



Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

**Kabupaten Batang
Tahun 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	I.1. Latar Belakang	I.1
	I.2. Landasan Hukum	I.4
	I.3. Maksud dan Tujuan	I.6
	I.4. Ruang Lingkup Kajian	I.6
	I.5. Metodologi	I.7
	I.6. Sistematika Penulisan	I.8
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	II.1
	II.1. Pengertian Roadmap dan Inovasi	II.1
	II.2. Pengertian Sistem Inovasi	II.4
	II.3. Kebijakan Penataan dan Pengembangan SIDA	II.8
	II.4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	II.11
	II.5. Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Penguatan SIDA	II.13
	II.6. Regulasi/Kebijakan Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Penguatan SIDA	II.18
BAB III	KONDISI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BATANG	III.1
	III.1. Gambaran Umum Daerah	III.1
	III.2. Gambaran Umum Penguatan SIDA Kabupaten Batang	III.21
	III.3. Permasalahan dan Potensi Penguatan SIDA Kabupaten Batang	III.28
BAB IV	EVALUASI PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BATANG	IV-1
	IV.1. Evaluasi Kebijakan SIDA Kabupaten Batang	IV.1
	IV.2. Evaluasi Penataan Unsur SIDA Kabupaten Batang	IV.5
	IV.3. Evaluasi Pengembangan SIDA Kabupaten Batang	IV.26
BAB V	STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BATANG	
	V.1. Strategi dan Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Batang	V.2
	V.2. Program dan Kegiatan Penguatan SIDA Kabupaten Batang	V.6

BAB VI	PENUTUP	
	VI.1. Kesimpulan	VI.1
	VI.2. Rekomendasi	VI.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program Penataan Sumber Daya SIDA	II.15
Tabel 3.1.	Luas Wilayah Kecamatan	III.2
Tabel 3.2.	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan	III.3
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan <i>Sex Ratio</i> Kabupaten Batang 2016	III.4
Tabel 3.4.	Indikator Kependudukan Kabupaten Batang 2012-2016	III.5
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.9
Tabel 3.6.	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.11
Tabel 3.7.	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.13
Tabel 3.8.	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2012-2016	III.16
Tabel 3.9.	Jenis dan Hasil Inovasi Kabupaten Batang	III.21
Tabel 3.10.	Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2016	III.27
Tabel 3.11.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Batang	III.28
Tabel 4.1.	Evaluasi Program Kebijakan SIDA Kabupaten Batang	IV.1
Tabel 4.2.	Evaluasi Program Penataan Unsur SIDA Kabupaten Batang	IV.5
Tabel 4.3.	Evaluasi Program Pengembangan SIDA Kabupaten Batang	IV.26
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA 2017-2022	V.3
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Penguatan SIDA 2018-2022	V.7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pengertian Inovasi	II.3
Gambar 2.2.	Konsep sebagai Landasan Memperkuat SIDA	II.5
Gambar 3.1.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.6
Gambar 3.2.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.7
Gambar 3.3.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.8
Gambar 3.4.	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.9
Gambar 3.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016	III.11
Gambar 3.6.	IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016	III.14
Gambar 3.7.	IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016	III.15
Gambar 3.8.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016	III.17

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Pada dasarnya inovasi daerah merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDa, penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa, mengembangkan SIDa melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat.

Terbitnya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan kapasitas inovatif. Untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas inovatif diperlukan agenda strategis yang harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Agenda strategis disusun berdasarkan landasan sistem inovasi daerah, termasuk penguatan kelembagaan, mekanisme hubungan dan dokumen rencana.

Dalam konteks pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, *roadmap* penguatan SIDA memuat tentang kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA dan rencana aksi penguatan SIDA. *Roadmap* penguatan SIDA ini mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, pengertian *roadmap* yang digunakan dalam peraturan bersama kedua menteri ini mengacu pada pengertian *roadmap* sebagai garis pedoman yang berisi rencana dan program-program atau serangkaian langkah yang harus dilakukan atau tujuan yang harus dicapai melalui tahapan-tahapan tertentu.

Pemerintah Kabupaten Batang telah menindaklanjuti arahan dan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut, dimana pada tahun 2013 telah terbit dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dimana dalam dokumen tersebut telah memuat tujuh bab yang terdiri dari Pendahuluan, Kondisi SIDA Saat Ini Kabupaten Batang, Tantangan Dan Peluang SIDA Kabupaten Batang, Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai Kabupaten Batang, Arah Kebijakan Dan Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Batang, Fokus Dan Program Prioritas SIDA Kabupaten Batang, serta Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Batang.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka terdapat tiga pertimbangan utama mengapa dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tersebut perlu untuk direvisi, yaitu pertimbangan pertama adalah bahwa dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 akan segera berakhir di tahun 2017, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh bagaimana capaian pelaksanaan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tersebut utamanya pada bagian Rencana Aksi Penguatan SIDa Kabupaten Batang.

Pertimbangan kedua perlunya dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 untuk direvisi adalah mengingat dokumen RPJMD Kabupaten Batang yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 juga akan segera berakhir.

Pertimbangan ketiga adalah bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang untuk periode 2017-2022, sehingga sejalan dengan amanat regulasi bahwa Bupati dan Wakil Bupati akan menyusun RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, dimana dalam hal ini, program/ Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) harus terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas maka perlu untuk mengevaluasi capaian Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 serta menyusun dan merumuskan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 agar sejalan dengan amanat pasal 5 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah bahwa Kebijakan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) harus terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 5);
17. Keputusan Bupati Batang Nomor : 050 / 078 /2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun program kegiatan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Sementara tujuan penyusunan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Memberikan gambaran dan kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang.
2. Mengevaluasi capaian pelaksanaan penguatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
3. Menyusun strategi, kebijakan dan program kegiatan dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

I.4. RUANG LINGKUP KAJIAN

Secara substansi, ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Identifikasi gambaran dan kondisi pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang.
2. Identifikasi permasalahan dan potensi dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang.
3. Evaluasi capaian pelaksanaan penguatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
4. Penyusunan program kegiatan dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Secara proses, ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Revisi Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Pengumpulan Data;
3. Pengolahan dan Analisis Data;
4. Penyusunan Substansi Laporan; dan
5. Pelaporan.

1.5. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan data

Jenis Data yang dikumpulkan pada penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yang merupakan hasil pengisian form-form instrumen penelitian dari para pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten Batang.

Sedangkan data sekunder adalah data data berupa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Batang.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. Pengisian Form/ Instrumen Penelitian oleh pemangku kepentingan dan perangkat daerah terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten Batang.
- b. Diskusi intensif dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tim teknis tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang terdiri atas pimpinan maupun staf.
- c. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka atau laporan-laporan terkait Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

3. Tehnik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah diskriptif kualitatif, metode ini merupakan hasil penerikan secara sistematis dan logis dari hasil isian form-form yang telah diisi oleh para pemangku kepentingan. Disamping itu juga dilakukan penarikan kesimpulan hasil dari wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD).

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Ruang Lingkup
- I.5 Metodologi
- I.6 Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- II.1 Pengertian Roadmap dan Inovasi
- II.2 Pengertian Sistem Inovasi
- II.3 Kebijakan Penataan dan Pengembangan SIDA
- II.4 Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- II.5 Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Penguatan SIDA
- II.6 Regulasi/Kebijakan Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Penguatan SIDA

BAB III KONDISI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BATANG

- III.1 Gambaran Umum Daerah
- III.2 Gambaran Umum Penguatan SIDA Kabupaten Batang
- III.3 Permasalahan dan Potensi Penguatan SIDA Kabupaten Batang

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BATANG

- IV.1 Evaluasi Kebijakan SIDA Kabupaten Batang
- IV.2 Evaluasi Penataan Unsur SIDA Kabupaten Batang
- IV.3 Evaluasi Pengembangan SIDA Kabupaten Batang

BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022

- V.1 Strategi dan Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Batang
- V.2 Program dan Kegiatan Penguatan SIDA Kabupaten Batang

BAB VI PENUTUP

- VI.1 Kesimpulan
- VI.2 Rekomendasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN ROADMAP DAN INOVASI

A. Pengertian *Roadmap*

Istilah *roadmap* secara bebas diterjemahkan dalam Wikipedia sebagai sesuatu yang merujuk kepada sebuah peta jalan (misal untuk membantu dalam navigasi); sebuah rencana (misal *roadmap* untuk perdamaian); rencana rinci atau penjelasan yang membimbing dalam menetapkan standar atau menentukan tindakan; garis pedoman yang berisi rencana dan program-program atau serangkaian langkah yang harus dilakukan atau tujuan yang harus dicapai; konseling, penyuluhan, bimbingan, nasehat, petunjuk yaitu sesuatu yang memberikan arahan atau saran untuk suatu keputusan atau tindakan.

Dalam konteks pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, *roadmap* penguatan SIDA memuat tentang kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA dan rencana aksi penguatan SIDA. *Roadmap* penguatan SIDA ini mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, pengertian *roadmap* yang digunakan dalam peraturan bersama kedua menteri ini mengacu pada pengertian *roadmap* sebagai garis pedoman yang berisi rencana dan program-program atau serangkaian langkah yang harus dilakukan atau tujuan yang harus dicapai melalui tahapan-tahapan tertentu.

B. Pengertian Inovasi

Walaupun banyak persamaan maknanya, namun beberapa pihak mendefinisikan istilah inovasi secara berbeda. Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa contoh pengertian inovasi:

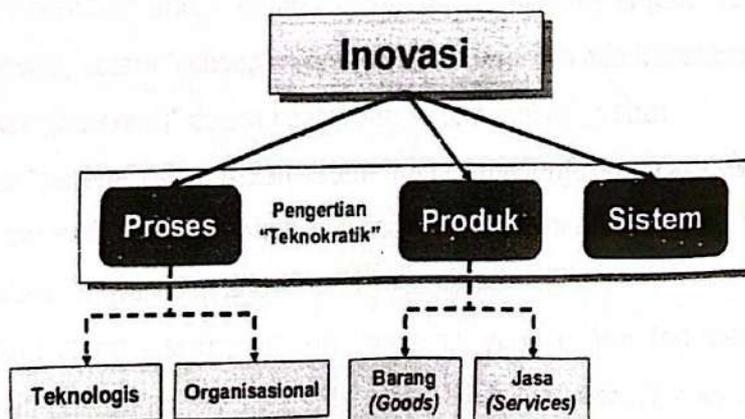
1. *"The commercial or industrial application of something new - a new product, process, or method of production; a new market or source of supply; a new form of commercial, business or financial organization"* (Joseph Schumpeter, 1934, dalam *"The Theory of Economic Development"* dalam Taufik, 2005);
2. *Innovation is simply the introduction of something new into the marketplace* (Stopper, 2002 dalam Taufik, 2005);
3. Inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru (dalam bentuk materi ataupun *intangible*) yang memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu (Edquist, 2001, 1999);
4. Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru; tindakan menggunakan sesuatu yang baru (Rosenfeld, 2002);
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU No. 18 Th. 2002).

Beberapa definisi yang disebutkan mengungkapkan bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan (yang membuka dan/atau untuk memanfaatkan peluang baru), namun juga berkaitan dengan (potensi) nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari pembaruan/perbaikan yang sekedar "kreativitas biasa" (dalam arti tidak memberikan manfaat atau dampak nyata), beberapa pihak terkadang menyebut

"inovasi yang diadopsi" atau terbukti "berhasil" secara komersial/ekonomi sebagai "inovasi produktif" (*productive innovation*).

Dari beragam definisi yang berkembang, istilah inovasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai: "proses" dan/atau "hasil" pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar.

Dalam "pengertian teknokratik," inovasi sering ditekankan sebagai proses di mana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialisasikan di pasar. Definisi yang "luas dikenal" (atau setidaknya lebih sering didengar) adalah yang bersifat "teknokratik" tersebut, yang lebih mengedepankan inovasi teknologi dengan penekanan perspektif teknis. Walaupun begitu, tentunya inovasi dalam pengertian lebih luas tidak hanya terbatas pada proses dan/atau produk saja.



Gambar 2.1
Pengertian inovasi

2.2. PENGERTIAN SISTEM INOVASI

Untuk mengawali bahasan tentang sistem inovasi, berikut adalah beberapa definisi yang berkembang tentang sistem inovasi dari beragam sudut pandang. Freeman (1987) dalam Taufik (2005): sistem inovasi adalah jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru.

Lundvall (1992): sistem inovasi merupakan elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi. Pada bagian lain ia juga menyampaikan bahwa sistem inovasi merupakan suatu sistem sosial di mana pembelajaran (*learning*), pencarian (*searching*), dan penggalian/eksplorasi (*exploring*) merupakan aktivitas sentral, yang melibatkan interaksi antara orang/masyarakat dan reproduksi dari pengetahuan individual ataupun kolektif melalui penguatan (*remembering*).

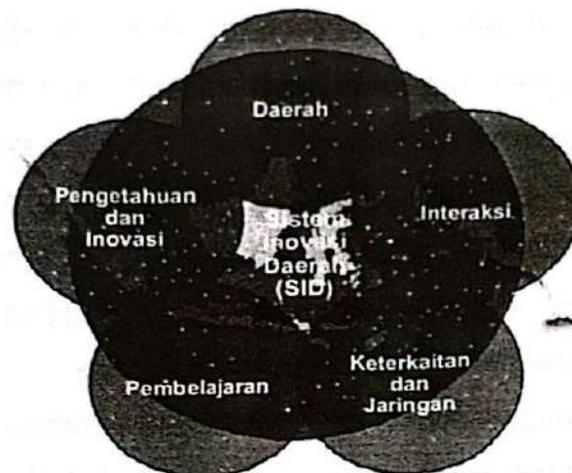
Nelson dan Rosenberg (1993): sistem inovasi merupakan sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif (*innovative performance*).

Dari beragam uraian definisi tersebut dan perkembangan dalam literatur sistem inovasi, secara "konsep" sejauh ini pada dasarnya ada beberapa hal penting yang "lekat" (*inherent*) dalam pengertian sistem inovasi, yaitu:

- ❖ Kata "sistem" dalam istilah sistem inovasi menunjukkan cara pandang yang secara sadar memperlakukan suatu kesatuan menyeluruh (holistik) dalam konteks "inovasi dan difusi."
- ❖ Dalam literatur sistem inovasi, konvensi yang umum tentang pengertian istilah "sistem inovasi" pada dasarnya lebih luas dari (mencakup) "sistem iptek" (dan bagian dari sistem relevan lainnya). Istilah "sistem inovasi" juga meliputi konteks "inovasi dan difusinya."

- ❖ Walaupun ada yang menggunakan istilah "sistem riset dan inovasi" (*research and innovation system*), namun istilah "sistem inovasi dan difusi" tidak lazim digunakan.

Dalam konteks Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka pengertian Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.



Gambar 2.2.
Konsep sebagai Landasan Memperkuat SIDA

Konsep sistem inovasi daerah pada intinya mengandung beberapa elemen penting seperti diilustrasikan pada Gambar 1.2. di atas. Konsep ini, dapat membantu bagaimana daerah mengembangkan/menyusun strateginya untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasinya dalam mengatasi isu/persoalan-persoalan yang dihadapi. Beberapa elemen utama konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daerah. Konsep SIDA memang merupakan cara pandang tentang sistem inovasi pada tataran daerah. Dari perspektif administratif

pemerintahan, "batasan" pengertian daerah secara formal-administratif (misalnya kabupaten/kota ataupun provinsi) sering menjadi alat paling mudah untuk menetapkan batasan sistem (*system boundaries*). Namun patut diingat bahwa pengetahuan, aktivitas inovasi dan bisnis pada intinya "tidak" mengenal batasan demikian. Pemajuan sistem inovasi daerah membutuhkan cara pandang yang lebih terbuka dan menguntungkan bagi daerah lebih dari sekedar pertimbangan batasan administratif.

Karena itu, kerjasama dengan daerah lain merupakan aspek yang harus digali dan dikembangkan oleh setiap daerah dalam memperkuat daerah masing-masing. Hal-hal seperti ini memang semakin membutuhkan kemampuan daerah menghadapi/mengatasi paradoks yang berkembang, bahwa bersaing dan bekerjasama merupakan kemampuan yang perlu terus dikembangkan secara bersamaan. Konsep "daerah" dalam sistem inovasi, pada dasarnya dapat diartikan secara fleksibel agar memiliki pengertian kontekstual.

2. Interaksi. Konsep sistem mengindikasikan bahwa elemen-elemen dalam sistem berinteraksi satu dengan lainnya dan berproses ke arah yang lebih baik, sesuai dengan peran masing-masing aktor. Sistem tanpa interaksi antareleman hanyalah sistem yang "semu." Interaksi yang sehat adalah interaksi yang produktif dan menghasilkan keuntungan/manfaat timbal-balik bagi para pihak yang berinteraksi, meskipun dalam bentuk yang mungkin berbeda (tidak selalu sama) terhadap/bagi masing-masing pihak. Dinamika sistem inovasi daerah akan ditentukan oleh bagaimana fungsi dalam sistem berjalan dan interaksi berkembang, serta para aktor sama-sama bekerja dan bekerjasama dalam sistem tersebut.
3. Keterkaitan dan Jaringan. Keterkaitan dan jaringan rantai nilai menjadi dasar bagi penguatan sistem inovasi dan perlu ditumbuhkembangkan.

Keterkaitan dan jaringan ini tidak saja menyangkut aktivitas bisnis (komersial) tetapi juga non-bisnis. Hubungan non-bisnis yang semakin baik merupakan kunci bagi peran para pihak (perorangan maupun organisasi), termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah, dalam mendukung aktivitas inovasi dan bisnis. Dari kepentingan sosial dan ekonomi, interaksi dan hubungan (keterkaitan dan jaringan) inilah yang menentukan/mempengaruhi *spillovers* atau eksternalitas ekonomi positif dalam masyarakat, terutama di daerah.

4. Pembelajaran. Inti dari perkembangan sistem inovasi adalah proses pembelajaran. Sistem inovasi (nasional, daerah ataupun sektoral) akan berkembang jika sistem tersebut mampu menjadi sistem yang belajar (*the learning system*) dan mampu mengembangkan sistem pembelajaran (*the system of learning*) yang sesuai (dengan konteksnya) serta beradaptasi terhadap perubahan yang berkembang. Daerah yang telah relatif maju sekalipun, ketika "berhenti" dalam proses pembelajaran akan menjadi statis, bahkan mungkin menurun dan selanjutnya tertinggal dari daerah lain.
5. Pengetahuan dan Inovasi. Perkembangan sistem inovasi daerah tentu akan ditentukan oleh kemajuan pengetahuan dan inovasi (termasuk praktik baik/terbaik). Aliran pengetahuan (*knowledge flow*) yang terhambat karena kelemahan penyedia (*provider* atau *knowledge pool*), saluran (misalnya *intermediaries*, mekanisme atau lainnya), dan pengguna (*knowledge users*) akan menghambat berkembangnya sistem inovasi daerah. Pengetahuan, baik yang bersifat *tacit* maupun eksplisit/terkodifikasi (*codified knowledge*), perlu terus dikembangkan, tidak saja dengan mengadopsi dari luar, tetapi juga dengan mengembangkan pengetahuan sendiri (termasuk *indigenous knowledge/technology*) dan mengkombinasikan, mengintegrasikan

serta mengembangkan keduanya, sesuai dengan kebutuhan setempat dan kebutuhan pemenuhan relung pasar luar yang potensial.

2.3. KEBIJAKAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SIDA

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup penguatan SIDA adalah meliputi kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur SIDA dan pengembangan SIDA. Dalam kebijakan penguatan SIDA diatur tentang kebijakan nasional penguatan SIDA yang ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri, kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya ditetapkan oleh Gubernur serta kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kebijakan penguatan SIDA tersebut disusun oleh tim koordinasi dan kebijakan ini tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian. Pada level daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan penguatan SIDA tersebut tercantum dalam *roadmap* penguatan SIDA, RPJMD, dan RKPd atau dengan kata lain tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan *roadmap* penguatan SIDA ke dalam dokumen RPJMD serta mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA ke dalam dokumen RKPd.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penguatan SIDA ini, maka Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di level pusat. Kemudian Gubernur melakukannya di level provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta Bupati/Walikota melakukannya di level kabupaten/kota. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA ini meliputi melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA, melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA, dan memadukan kebijakan-

kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.

Dalam peraturan bersama dua menteri ini juga diatur tentang penataan unsur SIDA yang meliputi penataan kelembagaan SIDA, penataan jaringan SIDA dan penataan sumber daya SIDA. Kelembagaan SIDA terdiri atas lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya. Lembaga/organisasi meliputi institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah. Peraturan merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA. Sementara itu norma/etika/budaya merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.

Penataan institusi pemerintah dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDA. Penataan terhadap pemerintahan daerah dilakukan dengan cara membentuk BPPD dan meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDA. Penataan lembaga dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Penataan lembaga penunjang inovasi dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA. Penataan dunia usaha dilakukan dengan cara memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA. Serta penataan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA. Penataan terhadap peraturan dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA. Sedangkan penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara

mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

Selanjutnya pengaturan tentang Penataan Jaringan SIDA. Yang di maksud dengan jaringan SIDA adalah interaksi antar lembaga/organisasi dalam SIDA. Interaksi ini dimaksudkan untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan. Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui komunikasi intensif antara lembaga SIDA, mobilisasi sumber daya manusia, dan optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Komunikasi intensif dilakukan melalui penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya; menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.

Pada bagian bagian lain peraturan bersama dua menteri ini diatur pula tentang Penataan Sumber Daya SIDA. Sumber daya SIDA terdiri dari kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya; kekayaan intelektual dan informasi; dan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan sumber daya SIDA ini dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA. Penataan sumber daya SIDA meliputi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA; pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya; pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir; peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; pemanfaatan data dan informasi; dan pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan melalui kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah; dan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan

sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Sedangkan optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan HKI, pemanfaatan informasi SIDA, dan pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Sedangkan pengaturan Pengembangan SIDA yang dilaksanakan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri di level pusat, oleh Gubernur di level provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta oleh Bupati/Walikota di level kabupaten/kota. Pengembangan SIDA ini didelegasikan kepada tim koordinasi. Pengembangan SIDA ini meliputi kegiatan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah; pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan pemberlanjutan penguatan SIDA.

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya. Pemetaan potensi dan analisis SIDA dilakukan melalui identifikasi dan pengumpulan data; pemetaan; dan analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan. Serta pemberlanjutan penguatan SIDA dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

2.4. PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Negara-negara maju didunia ini membangun negaranya berdasarkan atas perkembangan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara-negara maju tersebut telah berhasil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai dengan potensi sumberdaya yang mereka miliki sebagai sebuah sistem yang teritegrasi. Penguasaan iptek dewasa ini menjadi basis keunggulan suatu bangsa yang akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan suatu bangsa. Seiring dengan paradigma globalisasi dimana batasan

ruang dan waktu semakin tipis, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan keunggulan komparatif yaitu pada sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif yaitu perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/ KBE*). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer keunggulan ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan dalam meningkatkan daya saing.

Di dalam rangka peningkatan daya saing nasional, bangsa Indonesia harus mendorong penguasaan iptek dan menciptakan sistem inovasi seperti yang selama ini dilakukan oleh negara-negara maju. Sistem inovasi tersebut bertujuan untuk mendorong penguasaan dan penggunaan iptek dalam memanfaatkan potensi lokal agar dapat bersaing ditingkat internasional.

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mendorong terciptanya sistem tersebut telah melumcurkan regulasi yaitu Undang-Undang No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Penerapan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Inovasi didalam penerapan iptek merupakan faktor yang menentukan, hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU No. 18 Th. 2002).

Beberapa definisi yang disebutkan mengungkapkan bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan (yang membuka dan/atau untuk memanfaatkan peluang baru), namun juga berkaitan dengan (potensi) nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari

pembaruan/perbaikan yang sekedar "kreativitas biasa" (dalam arti tidak memberikan manfaat atau dampak nyata), beberapa pihak terkadang menyebut "inovasi yang diadopsi" atau terbukti "berhasil" secara komersial/ ekonomi sebagai "inovasi produktif" (*productive innovation*).

Dari beragam definisi yang berkembang, istilah inovasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai: "proses" dan/atau "hasil" pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar.

Dalam "pengertian teknokratik," inovasi sering ditekankan sebagai proses di mana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialisasikan di pasar. Definisi yang "luas dikenal" (atau setidaknya lebih sering didengar) adalah yang bersifat "teknokratik" tersebut, yang lebih mengedepankan inovasi teknologi dengan penekanan perspektif teknis. Walaupun begitu, tentunya inovasi dalam pengertian lebih luas tidak hanya terbatas pada proses dan/atau produk saja.

Uraian tersebut memberikan landasan yang kuat agar Sistem Inovasi perlu untuk diperkuat agar nilai-nilai inovasi dapat melembaga dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan dari pemerintah pusat sampai di daerah.

2.5. PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SUMBER DAYA PENGUATAN SIDA

Penataan sumberdaya SIDA dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA yang ada pada kelembagaan SIDA. Sumberdaya SIDA terdiri dari:

- a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
- b. kekayaan intelektual dan informasi; dan
- c. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber daya pakar, kekayaan intelektual, dan sarana prasarana iptek terdapat baik pada lembaga-lembaga litbang pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi, ataupun perorangan.

Penataan sumber daya SIDA meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar dapat menata sumberdaya SIDA dengan baik, maka Tim koordinasi penguatan SIDA Kabupaten Batang harus membuat peta sumber daya (baik yang dimiliki maupun kebutuhan kompetensi SDM yang dibutuhkan tetapi belum dimiliki) dalam bentuk Sistem Informasi Sumberdaya yang dimiliki dan dapat diakses oleh pemangung kepentingan SIDA. Khusus untuk kebutuhan kompetensi SDM yang dibutuhkan, dapat diinventarisasi pada saat pertemuan-pertemuan Penguatan Jaringan SIDA.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Tim koordinasi bersama-sama stakeholder SIDA lainnya (termasuk centra HKI jika ada) setempat, melakukan inventarisasi dan membuat basis data SDM, HKI dan sarana-prasarana litbang yang tersedia di daerah, baik yang dikelola oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta. Basis data tersebut dipublikasikan secara luas ke masyarakat, baik melalui media brosur maupun *website*.

Informasi penting yang minimal harus ada pada Sistem informasi Sumber daya SIDA adalah:

1. Pakar
 - a. Nama
 - b. pendidikan
 - c. Keahlian
 - d. Kompetensi
 - e. Institusi
 - f. Karya
2. Kekayaan intelektual dan informasi
 - a. Jenis Kekayaan intelektual
 - b. Manfaat dan kegunaan Kekayaan intelektual
 - c. Pemegang Hak Kekayaan intelektual
 - d. Nomor Kontak pemegang hak kekayaan intelektual
3. Sarana prasarana Iptek
 - a. Nama sarana dan prasarana
 - b. Lokasi beradayaan sarana dan prasarana
 - c. Kondisi sarana dan prasarana
 - d. Nama penanggungjawab sarana dan prasarana
 - e. Nomor Kontak penanggung jawab sarpras

Secara umum, program penataan Sumberdaya SIDA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Program Penataan Sumber Daya SIDA

No.	Sub Kegiatan	Sasaran/Output	Tahapan
1.	Sistem Informasi Sumberdaya SIDA	Adanya Sistem Informasi Sumberdaya SIDA	a. Mendesain sistem informasi sumberdaya SIDA b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data.

No.	Sub Kegiatan	Sasaran/Output	Tahapan
			c. Melakukan input dan update data d. Melakukan sosialisasi dan evaluasi e. Melakukan pemantauan dan maintenance
2.	Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya	Termanfaatkannya keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA	a. Melakukan klasifikasi data kompetensi. b. Melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi c. Menyampaikan rekomendasi penetapan kompetensi sumberdaya manusia dan pengorganisasiannya kepada Kepala Daerah d. Melaksanakan pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasian. e. Melakukan pemantauan.
3.	Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir	Adanya model pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir yang mendorong seseorang berkontribusi maksimal	a. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan struktur dan strata keahlian jenjang karir. b. Menganalisa hasil pemetaan tersebut pada angka 1 dalam FGD. c. Menyusun rancang bangun model d. Menetapkan model kebutuhan struktur dan strata keahlian jenjang karir melalui Keputusan Pejabat Berwenang e. Melaksanakan Surat Keputusan terkait

No.	Sub Kegiatan	Sasaran/Output	Tahapan
			model struktur dan strata keahlian jenjang karir
4.	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Adanya peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	<p>a. Menjajaki kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan HKI dengan sentra-sentra HKI.</p> <p>b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi HKI terdaftar.</p> <p>c. Melakukan survey identifikasi kebutuhan pasar atas HKI terdaftar</p> <p>d. Menyusun buku daftar HKI berpotensi komersial.</p> <p>e. Menyelenggarakan acara temu bisnis dengan kalangan industri.</p> <p>f. Memfasilitasi kerjasama bisnis pemanfaatan HKI dengan kalangan industri.</p>
5.	Pemanfaatan data dan informasi	Termanfaatkannya data dan informasi sumberdaya SIDA secara maksimal	<p>a. Melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi.</p> <p>b. Mensosialisakan data dan informasi kepada publik melalui berbagai medi</p> <p>c. Melakukan pemantauan atas pemanfaatan data dan informasi.</p>
6.	Pengembangan sarana dan	Adanya pengembangan	a. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan

No.	Sub Kegiatan	Sasaran/Output	Tahapan
	prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.	sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	sarana dan prasarana iptek. b. Menganalisa hasil pemetaan tersebut pada angka 1 dalam FGD. c. Menyusun agenda pengembangan sarana dan prasarana iptek d. Merekomendasikan penetapan agenda pengembangan sarana dan prasarana iptek kepada Pejabat Berwenang. e. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana iptek f. Melakukan pemantauan atas pemanfaatan sarana dan prasarana iptek yang dikembangkan.

2.6. REGULASI/KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SUMBER DAYA Penguatan SIDA

Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa salah satu elemen dari pengembangan sistem inovasi didaerah adalah kebijakan yang mendukung pengembangan sistem inovasi daerah. Selanjutnya taufik (2005) mengajukan 6 (enam) kelompok agenda utama kebijakan inovasi yang perludikembangkan di daerah untuk mengembangkan sistem inovasi daerah walaupun tidakseluruhnya merupakan ranah daerah dan harus dilakukan oleh daerah. Keenam agenda utama ini, yang juga merupakan tujuan strategis pengembangan sisteminovasi daerah adalah:

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.

Tujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di daerah secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi. Penataan mendasar termasuk penataan/pengembangan basis data daerah berkaitan dengan sistem inovasi daerah.

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkannya kemampuan absorpsi industri.

Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur-unsur lembaga yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah, meningkatkan daya ungkit peran iptek/litbangyasa yang sesuai dan spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil litbangyasa/inovasi serta mengembangkannya.

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa.

Tujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multi pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebaran praktik baik dan hasil-hasil litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dampak inovasi atau pengetahuan/teknologi secara signifikan atas kemajuan ekonomi daerah sebenarnya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan luas difusinya dapat didorong di daerah yang bersangkutan. Bagi negara seperti Indonesia, agenda ini merupakan faktor yang penting dibanding dengan di negara maju, mengingat sebagian besar pelaku bisnis (yaitu UKM) pada dasarnya merupakan pelaku yang relatif tertinggal kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap beragam kemajuan teknis.

4. Mendorong budaya inovasi.

Tujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru yang inovatif, serta memperkuat kohesis sosial di daerah. Persoalan ketertinggalan bisnis dari pesaing, kemampuan menyerap kemajuan iptek, penyesuaian diri terhadap perubahan persaingan bisnis yang dinamis, serta rendahnya perkembangan perusahaan baru yang inovatif membutuhkan perhatian yang sangat serius dari banyak pihak.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional.

Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalandengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di daerah dalam upaya membangun ekonomi wilayah/lokal dengan pendekatan sistem.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan pemangku kepentingan di daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah dan kemajuan daerah.

BAB III

KONDISI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BATANG

3.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Batang terletak antara $6^{\circ} 51' 46''$ dan $7^{\circ} 11' 47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ dan $110^{\circ} 03' 06''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan. Adapun perincian kecamatan tersebut di antaranya adalah Kecamatan Batang terdiri dari 12 Desa dan 9 Kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 Desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 Desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 Desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 Desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 Desa; Kecamatan Bawang terdiri dari 20 Desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 Desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 Desa; Kecamatan Pecalungan terdiri dari 10 Desa; serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 Desa.

Kabupaten Batang memiliki wilayah seluas 78.864,16 Ha, yang dapat dirinci menurut luas wilayah per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Luas Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Wonotunggal	15	5.235,27
2.	Bandar	17	7.332,80
3.	Blado	18	7.838,92
4.	Reban	19	4.633,38
5.	Bawang	20	7.384,51
6.	Tersono	20	4.932,98
7.	Gringsing	15	7.276,64
8.	Limpung	17	3.341,66
9.	Banyuputih	11	4.442,50
10.	Subah	17	8.352,17
11.	Pecalungan	10	3.618,97
12.	Tulis	17	4.508,78
13.	Kandeman	13	4.175,67
14.	Batang	21	3.434,54
15.	Warungasem	18	2.355,38
	Total	248	78.864,16

Sumber: Batang Dalam Angka 2016

3.1.2. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 2.000 m, yaitu:

- a. Gunung Prau : tinggi 2.565 mdpal
- b. Gunung Sipandu : tinggi 2.241 mdpal
- c. Gunung Gajah Mungkur: tinggi 2.101 mdpal
- d. Gunung Alang : tinggi 2.239 mdpal
- e. Gunung Butak : tinggi 2.222 mdpal

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Selain itu, kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini

Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis, terutama pada wilayah Kabupaten Batang bagian selatan yang bercorak pegunungan. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

3.1.3. Penggunaan Lahan

Kabupaten Batang memiliki luas wilayah mencapai 78.864,16 Ha. Luas pemanfaatan lahan pada tahun 2016 terdiri dari 22.397,14 Ha (28,40%) lahan sawah dan 56.467,02 Ha (71,60%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,98%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,45%), sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Selengkapnya, dilihat dari luas penggunaan lahan, maka luasan lahan di Kabupaten Batang terdiri atas:

Tabel 3.2.
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Total
1.	Wonotunggal	1.725,43	3.509,84	5.235,27
2.	Bandar	2.412,74	4.920,06	7.332,80
3.	Blado	1.139,98	6.698,94	7.838,92
4.	Reban	1.461,25	3.172,13	4.633,38
5.	Bawang	1.691,41	5.693,10	7.384,51
6.	Tersono	1.906,31	3.026,67	4.932,98
7.	Gringsing	1.920,36	5.356,28	7.276,64
8.	Limpung	1.875,58	1.466,08	3.341,66
9.	Banyuputih	622,36	3.820,13	4.442,49
10.	Subah	1.168,38	7.183,79	8.352,17
11.	Pecalungan	1.031,64	2.587,33	3.618,97
12.	Tulis	1.329,62	3.179,16	4.508,78
13.	Kandeman	1.591,65	2.584,02	4.175,67
14.	Batang	1.392,20	2.042,34	3.434,54
15.	Warungasem	1.128,23	1.227,15	2.355,38
	Total	22.397,14	56.467,02	78.864,16

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka 2016

3.1.4. Kondisi Demografis

3.1.4.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2016 tercatat sejumlah 749.720 jiwa yang terdiri dari 374.375 jiwa laki laki dan 375.345 jiwa perempuan dengan sex ratio (penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 99,74%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Batang bertambah 6.630 jiwa di tahun 2016. Selengkapnya jumlah penduduk menurut kecamatan, jenis kelamin dan sex ratio tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio
Kabupaten Batang 2016

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Sex Ratio
		Laki Laki	Perempuan		
1.	Wonotunggal	16.297	16.207	32.504	100,56
2.	Bandar	33.444	33.120	66.564	100,98
3.	Blado	22.322	21.974	44.296	101,58
4.	Reban	18.544	18.626	37.170	99,56
5.	Bawang	26.806	26.505	53.311	101,14
6.	Tersono	18.727	18.687	37.414	100,21
7.	Gringsing	29.607	29.122	58.729	101,67
8.	Limpung	20.270	20.401	40.671	99,36
9.	Banyuputih	17.156	17.310	34.466	99,11
10.	Subah	25.191	25.822	51.013	97,56
11.	Pecalungan	15.513	15.986	31.499	97,04
12.	Tulis	17.443	17.700	35.143	98,55
13.	Kandeman	23.610	24.024	47.634	98,28
14.	Batang	62.054	62.578	124.632	99,16
15.	Warungasem	24.087	23.957	48.044	100,54
	2016	374.375	375.345	749.720	99,74
	2015	371.071	372.019	743.090	99,75
	2014	367.766	368.731	736.497	99,74
	2013	364.384	362.207	729.591	100,60
	2012	360.913	361.683	722.596	99,79

Sumber: BPS Kab. Batang 2017

Lebih lanjut, gambaran kependudukan Kabupaten Batang juga dapat dilihat dari indikator kependudukan yaitu Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Indikator Kependudukan Kabupaten Batang 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,99	0,97	0,95	0,90	0,90
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	907	925	934	942	950
3.	Jumlah Rumah Tangga (ruta)	167.474	168.337	169.165	169.655	170.501
4.	Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/ruta)	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4
5.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur					
	0-14 tahun	186.416	185.922	185.378	184.794	184.173
	15-64 tahun	492.595	498.868	504.866	510.427	515.905
	>65 tahun	43.485	44.801	46.253	47.869	49.642
6.	Rasio Ketergantungan	46,66	46,25	45,88	45,58	45,32

Sumber: BPS Kab. Batang 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi penurunan, dimana tahun 2012 sebesar 0,99% turun menjadi 0,90% di tahun 2016. Namun dari aspek kepadatan penduduk dan jumlah rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata rata anggota rumah tangga tahun 2016 sebanyak 4,4 jiwa per rumah tangga.

Jika melihat jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif yang sebanyak 282.090 jiwa. Komposisi ini menggambarkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Batang masuk pada kategori rendah karena angka ketergantungan berada pada tingkat 45,32 yang berarti bahwa tiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban sekitar 45 jiwa penduduk yang tidak produktif.

3.1.4.2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya) sebanyak 129,973 jiwa atau 17%. Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah wiraswasta sebanyak 122,718 jiwa atau 16%. Sementara itu, terdapat pula data masyarakat yang tidak bekerja mencapai 130,077 jiwa atau

17%. Selain itu, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS, TNI dan Polri kurang dari 2%.

3.1.4.3. Penduduk Menurut Pendidikan

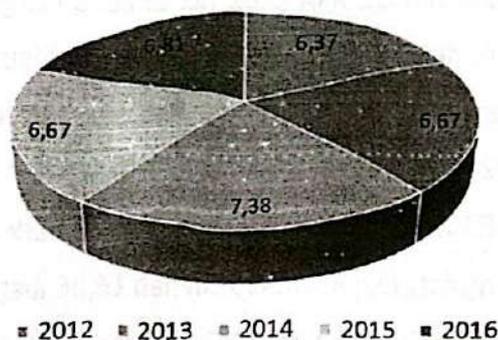
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah:

- | | | |
|----|---|----------|
| a. | Tidak / belum tamat SD | : 30,72% |
| b. | Tamatan SD | : 41,32% |
| c. | Tamatan SMP | : 16,14% |
| d. | Tamatan SMA/SMK | : 8,85% |
| e. | Tamatan Diploma (I-IV)/
Akademi dan Perguruan Tinggi | : 2,98% |

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Batang masih berpendidikan tamat SD ke bawah, sehingga menjadi perhatian pokok dalam pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Batang.

Apabila dikaji lebih mendalam, maka diketahui kondisi rata-rata lama sekolah dari penduduk Kabupaten Batang selama tahun 2012-2016, adalah tampak pada gambar berikut ini:

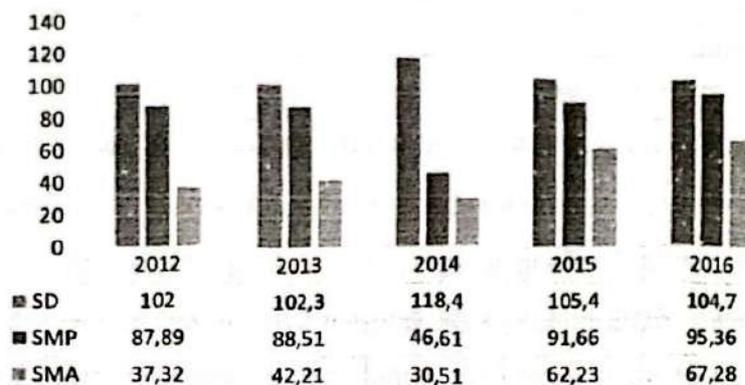
Gambar 3.1.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Batang
Tahun 2012-2016



Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka dan LKPJ Batang 2016

Kondisi rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten Batang semakin membaik selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2012 selama 6,37 tahun, meningkat menjadi 6,67 tahun pada tahun 2013, pada tahun 2014 meningkat menjadi 7,38, kondisi tahun 2015 menurun menjadi 6,67 tahun kemudian tahun 2016 naik kembali menjadi 6,81.

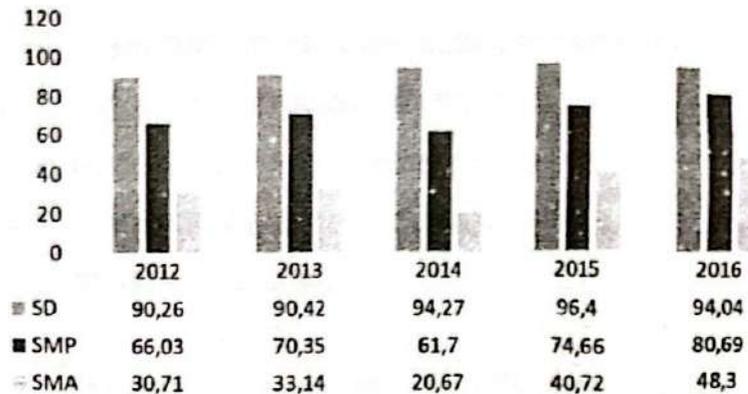
Gambar 3.2.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Batang
Tahun 2012-2016



Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka dan LKPJ Batang 2016

Diketahui pula, kondisi Angka Partisipasi Kasar Penduduk Kabupaten Batang selama tahun 2012-2015, adalah tampak pada grafik di atas. APK SD cenderung mengalami fluktuasi dari 102,1 tahun 2012 menjadi 102,3 tahun 2013 meningkat cukup tinggi pada tahun 2014 menjadi 118,4 namun menurun pada tahun 2015 menjadi 105,4, sedangkan pada tahun 2016 APK SD menurun pada angka 104,7. APK SMP bersifat fluktuatif, tahun 2012 sebesar 87,89, tahun 2013 menjadi 88,51, tahun 2014 turun menjadi 46,61 dan pada tahun 2015 naik kembali menjadi 91,66, sedangkan pada tahun 2016 APK SMP Meingkat menjadi 95,36. Kemudian APK SMA, juga fluktuatif, tahun 2012 sebesar 37,32, tahun 2013 sebesar 42,21, pada tahun 2014 turun menjadi 30,51 dan naik kembali pada tahun 2015 menjadi 62,23. Sedangkan pada tahun 2016 kondisi APK SMA meningkat pada angka 67,28.

Gambar 3.3.
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Batang
Tahun 2012-2016



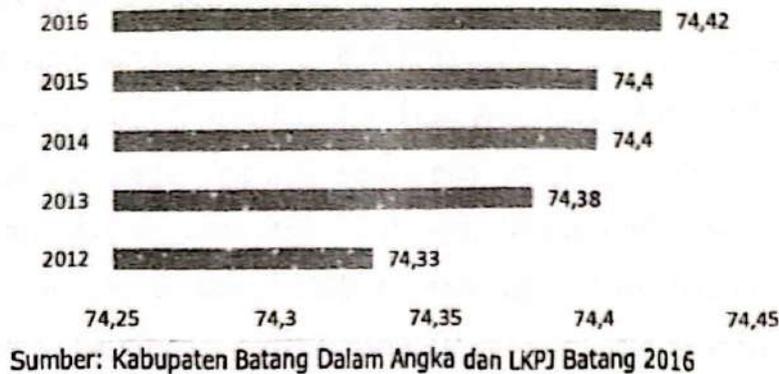
Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka dan LKPJ Batang 2016

Diketahui pula, kondisi Angka Partisipasi Murni Penduduk Kabupaten Batang selama tahun 2012-2015, adalah tampak pada grafik di atas. APM SD selalu meningkat dari 90,26 tahun 2012 menjadi 90,42 tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi 92,27 dan kembali naik pada tahun 2015 menjadi 96,40 kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 94,04. APM SMP terus mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sebesar 66,03, tahun 2013 menjadi 70,35, tahun 2014 turun menjadi 61,70, pada tahun 2015 naik kembali menjadi 74,66 dan pada tahun 2016 naik menjadi 80,69. Kemudian APM SMA bersifat fluktuatif, tahun 2012 sebesar 30,71, tahun 2013 menjadi 33,14, pada tahun 2014 turun menjadi 20,67 dan naik kembali pada tahun 2015 menjadi 40,72, sedangkan tahun 2016 kondisi APM SMA berada pada angka 48,3 atau mengalami kenaikan.

3.1.4.4. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah angka harapan hidup, untuk kondisi 5 (lima) tahun terakhir, Angka Harapan Hidup penduduk Batang relatif membaik, dari 74,33 tahun 2012 meningkat menjadi 74,42 tahun pada tahun 2016. Peningkatan angka harapan hidup ini juga banyak dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Batang.

Gambar 3.4.
Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2016



3.1.5. Gambaran Kesejahteraan Masyarakat

3.1.5.1. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan memiliki peran dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, mewujudkan pemerataan kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Gambaran Ketenagakerjaan Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	68,71	68,71	68,68	68,96	68,96
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	per 1.000	3,5	7,07	16,99	19,83	0,26
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,71	68,71	68,68	68,96	68,96
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	31	23	56,6	67,14	71,06
5.	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,18	2,87	4,5	5,48	5,48

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
6.	Keselamatan dan perlindungan	%	7,06	9,19	9,19	14,16	50,55

Sumber: DPMPTSP dan Naker, 2017

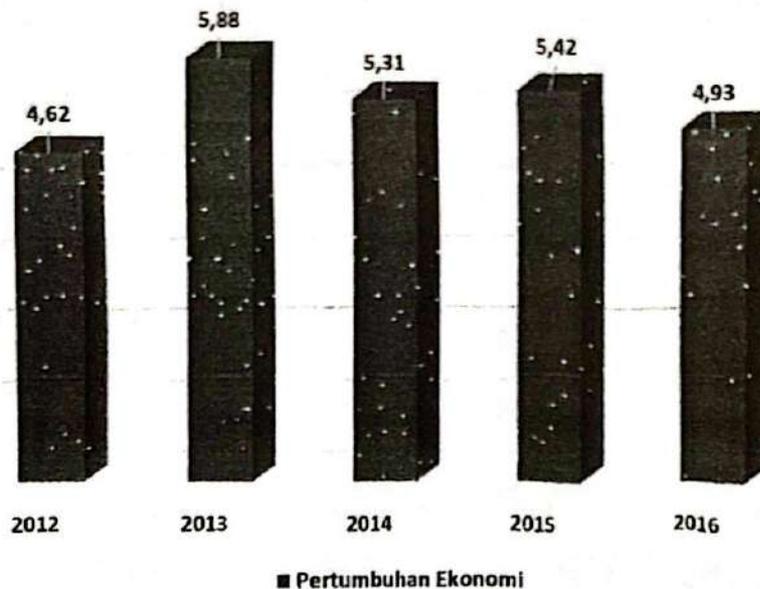
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi tenaga kerja dapat dilihat dari angka partisipasi angkatan kerja yang merupakan presentase besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Batang. Capaian angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Batang mengalami peningkatan dari sebesar 68,71% di tahun 2012 menjadi sebesar 68,96% di tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada pencari kerja yang ditempatkan sebesar 71,06% di tahun 2016 yang sebelumnya masih sebesar 31% di tahun 2012. Berbeda dengan kondisi tersebut, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batang yang mengindikasikan persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran masih mengalami kenaikan dimana tahun 2012 sebesar 2,18% meningkat menjadi 5,48% pada tahun 2016.

Capaian angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi dimana sebelumnya terjadi peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,26. Kemudian keselamatan dan perlindungan yang merupakan hak setiap pekerja atau buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja mengalami peningkatan menjadi sebesar 50,55% di tahun 2016.

3.1.5.2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya 2015 sebesar 5,42% menjadi 4,93% (2016) dan pertumbuhan ekonomi ini dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Jawa tengah sebesar 5,28% (2016). Selengkapnya kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang selama tahun 2012-2016 tampak pada gambar berikut ini:

Gambar 3.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang
Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2017

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang tidak terlepas dari sumbangan masing masing sektor perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang mengalami fluktuasi tiap tahunnya namun mengalami trend kenaikan.

Selengkapnya PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2012-2016

Sektor PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.858.594.72	3.124.443.33	3.464.395.99	3.809.621.34	3.971.951.74
B. Pertambangan dan Penggalian	268.763.63	287.600.19	337.473.65	399.548.93	441.253.41
C. Industri Pengolahan	3.814.421.17	4.255.486.62	4.811.599.25	5.310.074.29	5.787.554.45

Sektor PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.226.19	7.492.93	8.182.66	9.050.34	10.613.15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.128.76	13.166.67	13.764.50	14.746.33	16.776.23
F. Konstruksi	565.283.69	605.460.42	681.129.43	770.888.89	843.927.28
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.610.371.09	1.749.533.57	1.878.877.27	2.038.532.07	2.231.137.40
H. Transportasi dan Pergudangan	261.260.28	290.973.31	338.907.68	376.654.16	397.547.71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	432.245.55	464.357.06	521.353.36	590.409.99	663.359.32
J. Informasi dan Komunikasi	272.400.90	284.300.18	326.444.21	369.198.93	401.962.11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	217.827.56	235.261.65	248.172.27	275.231.51	313.437.97
L. Real Estate	121.101.81	132.298.43	150.578.76	165.617.38	179.990.37
M.N. Jasa Perusahaan	37.105.91	44.107.51	49.867.57	56.977.50	62.666.97
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322.734.59	353.499.76	378.623.11	421.370.45	439.047.46
P. Jasa Pendidikan	607.399.80	724.853.00	832.463.86	906.603.78	1.003.907.47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	76.267.85	87.056.43	102.647.13	112.678.87	123.805.14
R.S.T.U. Jasa Lainnya	201.454.21	226.570.50	263.958.48	281.305.31	311.889.22
Produk Domestik Regional Bruto	11.687.587.71	12.886.461.55	14.408.439.19	15.908.510.08	17.200.827.39

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2017

Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2016 berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang Rp. 5.787.554.45 dari total PDRB disusul sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.3.971.951.74 lalu diikuti oleh sektor perdagangan, Besar dan Eceran sebesar Rp.2.231.137.40.

Lebih lanjut PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 selengkapnya tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2012-2016

Sektor PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.520.644.31	2.585.089.50	2.620.675.54	2.707.284.09	2.771.144.55
B. Pertambangan dan Penggalian	254.742.04	267.677.36	272.360.45	278.656.66	287.497.26
C. Industri Pengolahan	3.320.259.78	3.615.243.32	3.850.335.49	4.054.441.07	4.233.332.73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.308.61	7.888.06	8.473.23	9.217.26	10.014.03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.044.87	12.814.26	13.062.57	13.379.25	14.681.78
F. Konstruksi	513.904.47	534.344.11	556.062.30	599.782.81	644.094.56
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.514.388.19	1.587.580.43	1.657.661.19	1.733.360.31	1.840.470.53
H. Transportasi dan Pergudangan	259.340.01	286.342.39	315.158.76	339.276.81	357.202.31
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	408.758.23	418.397.66	445.939.20	482.329.36	519.765.94
J. Informasi dan Komunikasi	275.828.91	299.774.63	358.904.85	415.045.51	451.408.85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	188.557.35	193.902.06	200.043.18	212.424.03	235.567.99
L. Real Estate	118.919.85	127.953.39	137.801.02	146.499.85	156.566.19
M.N. Jasa Perusahaan	34.084.27	38.759.97	42.786.64	45.663.47	48.710.19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	288.588.02	294.248.49	295.809.15	317.265.62	319.800.50
P. Jasa Pendidikan	507.784.86	550.796.63	606.719.65	647.293.00	695.770.85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	67.024.01	71.830.18	81.297.69	85.555.20	93.041.16
R.S.T.U. Jasa Lainnya	195.278.84	212.054.35	230.806.15	240.264.94	256.421.70
Produk Domestik Regional Bruto	10.488.456.63	11.104.696.78	11.693.897.06	12.327.739.23	12.935.491.09

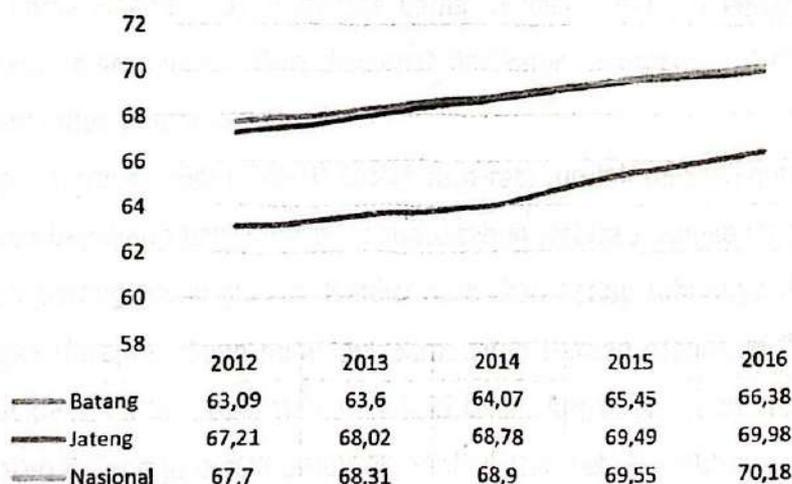
Sumber: BPS Kabupaten Batang 2017

3.1.5.3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Batang mencapai 63,60 meningkat menjadi 64,07 pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 65,45 pada tahun 2015. Akan tetapi, Perkembangan IPM Kabupaten Batang pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (69,49). Perkembangan IPM Kabupaten Batang dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini.

Gambar 3.6.
IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016



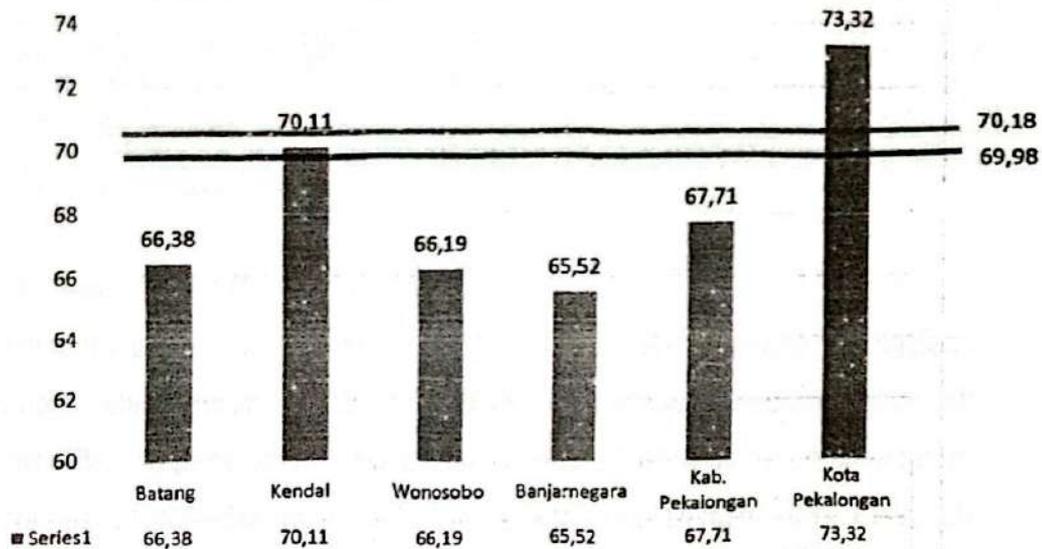
Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah), 2017

Capaian IPM Kabupaten Batang, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (65,52) dan Kabupaten Wonosobo

(66,19), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Pekalongan (67,71), Kabupaten Kendal (70,11) dan Kota Pekalongan (73,32). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:

Gambar 3.7.

IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016



Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah), 2017

IPM merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan kepada 4 indikator pembentuk. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Angka Harapan Hidup, 2) Harapan Lama Sekolah, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Dari keempat indikator pembentuk IPM tersebut, kesemuanya mengalami kenaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Batang mencapai 74,33 tahun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 74,46 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 HLS Kabupaten Batang mencapai 10,43 tahun meningkat menjadi 11,51 tahun pada tahun 2016. Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Batang menunjukkan perkembangan setiap tahun. Pada tahun 2012 pengeluaran

masyarakat baru mencapai Rp 782.100,- meningkat menjadi Rp 856.800,- pada tahun 2016.

Tabel 3.8.
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2012-2016

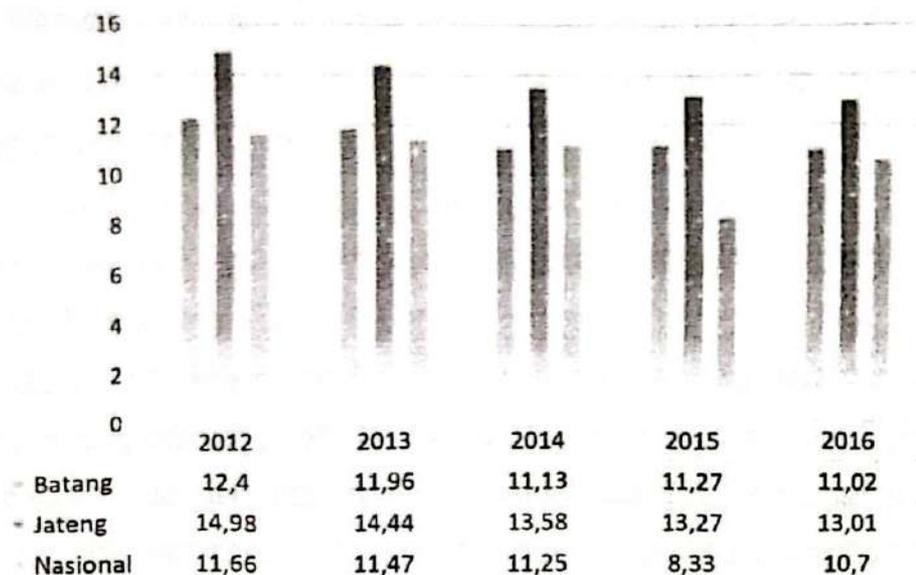
No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,33	74,38	74,40	74,42	74,46
2.	Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,43	10,45	10,65	11,09	11,51
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,43	10,45	6,00	6,41	6,42
4.	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Ribu Rp)	782,1	796,6	801,2	824,4	856,8
IPM		63,09	63,60	64,07	65,45	66,38

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

3.1.5.4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin (PO) di Kabupaten Batang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2016. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang pada tahun 2012 adalah sebesar 12,40% menurun pada tahun 2013 menjadi 11,96% dan menurun kembali ada tahun 2014 menjadi 11,13% atau menurun 0,83 poin. Namun demikian, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 11,27% kemudian turun kembali pada tahun 2016 menjadi 11,02. Persentase penduduk di Kabupaten Batang tahun 2016 masih lebih baik daripada persentase penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 13,01, akan tetapi jika dibandingkan dengan nasional, Kabupaten Batang masih lebih tinggi dimana penduduk miskin nasional adalah sebesar 10,70. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2017

3.1.6. Kondisi Ekonomi

3.1.6.1. Potensi Unggulan Daerah

Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Batang banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan antara lain potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata maupun potensi perindustrian dan perdagangan.

a. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Batang. Adapun luas pemanfaatan lahan pertanian pada tahun 2016 terdiri dari 22.433,13 Ha (28,45%) lahan sawah dan 56.431,03 Ha (71,55%) lahan bukan sawah. Sebagaimana besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,95%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,51%), sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Sementara itu, lahan bukan sawah digunakan untuk tegal/huma sebesar 37,48% yang merupakan presentase penggunaan terbesar, kemudian

digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput.

Komoditas padi dan jagung merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Batang dengan produksi mencapai 216.657 Ton untuk tanaman padi dan tanaman jagung sebesar 44.075 Ton di tahun 2016. Sedangkan untuk Tingkat produktifitas tanaman padi sekitar 5,11 Ton/Ha dan tanaman jagung sebesar 7,25 Ton/Ha. Untuk produksi beberapa jenis sayuran selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Produksi bawang merah, bawang putih dan bawang daun masing-masing yaitu 492 Kw, 17.148 Kw, dan 57.272 Kw. Sedangkan produksi petai dan melinjo masing-masing sebesar 16.982 Kw dan 42.234 Kw. Peningkatan jumlah produksi juga dialami pada komoditas palawija tanaman kacang tanah dengan produksi 5.504 Kw, atau meningkat 474 Kw dari tahun sebelumnya yang hanya 5.030 Kw. Selanjutnya tanaman ketela pohon mengalami peningkatan produksi sebesar 31.343 Kw dari tahun sebelumnya.

b. Potensi Perikanan

Kabupaten Batang terletak di wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan, Panjang garis pantai Kabupaten Batang tahun 2016 adalah 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air). Jenis-jenis ikan hasil penangkapan ikan di laut yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan mata besar, ikan remang, ikan bambangan/kakap merah dan ikan bawal. Sedangkan untuk jenis perikanan budidaya adalah udang windu, vanamae, udang putih, ikan bandeng serta ikan lele. Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saat ini belum dapat tergarap secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum dapat dimanfaatkannya wilayah laut seluas 249,395 km². Untuk perikanan budidaya dari potensi lahan air payau seluas 1.429,2 Ha baru dimanfaatkan seluas 292,6 Ha. Sedangkan potensi lahan budidaya air tawar seluas

300 Ha, baru dimanfaatkan seluas 167 Ha. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan.

c. Potensi Pariwisata

Kabupaten Batang memiliki banyak potensi pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun domestik. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Batang yang saat ini cukup menonjol adalah Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negro, Kolam renang Bandar, Curug Genting dan Curug Gombang. Sedangkan untuk jenis agrowisata adalah Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran dan Agrowisata Salak Sodong, sedangkan untuk jenis wisata boga adalah madu, emping, kerupuk kulit ikan, keripik nangka, keripik pisang, durian, rambutan, pisang tanduk serta salak. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya tarik wisata di Kabupaten Batang adalah meliputi:

- **Kirab Pusaka.** Kegiatan ini dimaksudkan untuk melestarikan budaya tradisional, guna mengenang para pejuang pendiri Kabupaten Batang yang dilaksanakan setiap tanggal 8 April bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Batang. Dalam acara tersebut diperkenalkan senjata Tombak Abirawa yang merupakan peninggalan Bupati Batang pertama yaitu Pangeran Kyai Adipati Maduredjo Trah Sunan Giri.
- **Lomban.** Lomban adalah kegiatan pesta nelayan yang berupa lomba perahu, sebagai tradisi para nelayan Kabupaten Batang yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan tanggal 1 Syawal di Sungai Sambong Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Kegiatan tersebut adalah merupakan perwujudan rasa syukur atas kemenangannya dalam menjalankan ibadah puasa.
- **Malam Jum'at Kliwonan.** Malam Jum'at Kliwonan adalah merupakan arena keramaian berupa pasar malam dimana banyak penjual/pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Disamping itu para pengunjung juga dapat membeli berbagai makanan khas Batang dan menikmati pagelaran kesenian tradisional.

- **Kesenian Daerah.** Berbagai kesenian daerah yang menjadi daya dukung wisata adalah kesenian lengger, kuntulan dan dengklung.

d. Potensi Hutan

Kabupaten Batang tahun 2016 memiliki kawasan hutan negara seluas 20.796,95 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi 15.316,51 Ha, kawasan hutan lindung 3.050,45 ha, kawasan hutan konservasi 93,89 Ha dan kawasan lindung 2.416,87 Ha. Selain itu, masih terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 10.771,44 Ha yang tersebar di 15 Kecamatan. Hutan ini menghasilkan berbagai jenis kayu seperti sengon, jati, dan pinus. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di Kabupaten Batang digunakan untuk bahan baku mebel, pertukangan, bak truk, galangan kapal, kayu bakar, sedangkan limbah kayu digunakan untuk kerajinan tangan. Adapun kayu bulat (log) maupun kayu setengah jadi dijual keluar daerah bahkan untuk jenis kayu jati diekspor ke Jepang. Disamping hasil hutan berupa kayu, dikembangkan pula budidaya aneka usaha kehutanan (non kayu) yaitu berupa budi daya lebah madu, sarang burung wallet, persuteraan alam dan kebun bibit desa.

e. Potensi Industri dan Perdagangan

Banyaknya hasil sumber daya alam di Kabupaten Batang baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sumber daya air yang cukup melimpah, sangat potensial bagi perkembangan industri dan perdagangan. Adapun jenis-jenis industri yang ada dan potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Batang adalah:

- Kerajinan Kulit.
- Pembuatan keripik buah pisang dan buah nangka.
- Pengolahan ikan.
- Emping melinjo.
- Pembuatan bak truk (load bak truck).
- Galangan kapal.
- Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

- Tepung Tapioka.
- Madu lebah.
- Batik.

3.2. GAMBARAN UMUM PENGUATAN SIDA KABUPATEN BATANG

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing nasional yang telah terbukti berhasil dan telah dilakukan oleh banyak negara maju di dunia adalah dengan memperkuat sistem inovasi nasional. Sistem ini diharapkan akan mampu membangkitkan kreatifitas dan inovasi yang diperlukan, agar produk-produk sebuah negara dapat bersaing secara langsung dengan produk negara lain, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut juga berlaku juga untuk meningkatkan daya saing daerah. Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut:

1. Tekanan persaingan global yang terus meningkat ;
2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan
3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

Beberapa jenis dan hasil inovasi yang dilakukan oleh kabupaten Batang dalam tiga tahun terakhir pada masing-masing OPD diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Jenis dan Hasil Inovasi Kabupaten Batang

No.	Jenis Inovasi	Hasil Inovasi	Manfaat Inovasi	Tahun		
				2014	2015	2016
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1.	Pelayana Pemerintahan	e-rembug pendidikan	Meningkatkan pelayanan perencanaan pendidikan	-	-	√
		e-bantu sekolahku	Membantu penggalian sumber daya keuangan sekolah	-	-	√
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No.	Jenis Inovasi	Hasil Inovasi	Manfaat Inovasi	Tahun		
				2014	2015	2016
1.	Pembangunan Infrastruktur wilayah jalan penghubung Kabupaten Batang dengan Kabupaten Banjarnegara	Membuka simpul ekonomi bagi warga pranten agar didalam pemasaran hasil pertanian dan meningkatkan hubungan sosial budaya antar warga masyarakat Pranten pada khususnya dan Bawang pada umumnya lebih lancar jagan membuka akses jalur pariwisata Batang - Dieng	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbukanya jalur perekonomian antar desa dan antar Kabupaten (Batang-Wonosobo b. Tersedianya jalur transportasi Yang lebih memadai bagi masyarakat dikarenakan medan yang sulit dilalui c. Membuka terisolasinya warga Pranten dengan warga disekitar kecamatan Bawang 	-	-	√
2.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jembatan penghubung Kabupaten Batang dengan Kabupaten Pekalongan	Membuka simpul ekonomi bagi warga Karangdadap agar didalam pemasaran hasil pertanian dan meningkatkan hubungan sosial budaya antar warga masyarakat Pandansari pada khususnya dan Karangdadap pada umumnya lebih lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbukanya jalur perekonomian antar desa dan antar Kabupaten (Batang-Pekalongan b. Tersedianya jalur transportasi Yang lebih memadai akses jalur ekonomi antara dua kabupaten lebih cepat 	-	-	√
3.	Sistim Informasi Tata Ruang (SITR) Kabupaten Batang	Transparasi publik terkait informasi Tata Ruang Wilayah berdasarkan perda	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemudahan Masyarakat luas (Regional, Nasional/Internasioanal) dalam mengakses informasi Rencana Tata Ruang Wilayah b. Pelayanan ITR lebih cepat 	-	-	-
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga						

No.	Jenis Inovasi	Hasil Inovasi	Manfaat Inovasi	Tahun		
				2014	2015	2016
1.	Pemanfaatan Teknologi informas	Pembuatan Web Pariwisata	Pariwisata Batang semakin dikenal	√	√	√
		Pembuatan batang tripe guide	Mempermudah akses ke daya tarik wisata	√	√	√
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1.	SMS Gateway	Layanan masyarakat SMS Gateway	Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang dokumen kependudukan		√	√
2.	Jemput bola dokumen kependudukan	Layanan dokumen kependudukan ke daerah-daerah terpencil	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	√	√	√
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.	Penelitian dan pengembangan	Infografis	Data Informasi tentang transparansi Anggaran	-	-	-
		Pompa Grafitasi	Alat untuk mengairi sawah di Gringsing yang tempatnya lebih tinggi dari tempat air	-	-	√
		Alat Perangkap Binatang Buas	Untuk menangkap binatang buas yang merusak tanaman penduduk	-	-	√
		Alat speayer elektrik	Untuk membantu petani agar lebih mudah dalam menyemprot hama tidak dipompa cukup dengan cara memencet tombol saja	-	-	√
Badan Kepegawaian Daerah						
1.	Simpeg Online dan Tata Naskah	Simpeg Online dan Tata Naskah	Bisa melakukan rekonsiliasi data PNS se OPD kab. Batang	-	-	√
2.	Proyek Perubahan dari Kegiatan Diklatpim	Terwujudnya proyek perubahan dari peserta kegiatan Diklatpim	Dapat memberikan pelayanan praktis kepada masyarakat	-	√	√
3.	Presensi Elektronik (Finger print)	Fingerprint secara online, untuk peningkatan disiplin PNS	Dapat memberikan dampak positif bagi PNS terutama dalam kedisiplinan dan peningkatan kinerja	√	√	√
4.	Front Office	Pelayanan tamu	Memudahkan akses tamu dalam pelayanan	-	-	√
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						

No.	Jenis Inovasi	Hasil Inovasi	Manfaat Inovasi	Tahun		
				2014	2015	2016
1.	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kelembagaan Unit layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin proses pelaksanaan barang/jasa lebih terintegrasi / terpadu, efektif, dan efisien sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; b. Menjamin ketersediaan informasi harga, penyedia, dan spesifikasi teknis barang/jasa; c. Menjamin persamaan pelayanan bagi penyedia barang/jasa; d. Menjamin adanya standarisasi Dokumen Pengadaan; e. Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh organisasi dan aparatur yang profesional; f. Memudahkan pembinaan SDM Pengadaan; dan g. Meningkatkan kinerja OPD dalam melaksanakan tupoksinya. 	√	√	√
		Standar Operasional Prosedur Mekanisme Kerja Unit Layanan Pengadaan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. tertib administrasi; b. akuntabilitas; c. perlakuan yang sama / tidak diskriminatif; d. efisiensi; dan e. ketepatan waktu 	√	√	√
Bagian Pengendalian Pembangunan						
1.	Penataan Unsur Sida	Nota Kesepahaman Pengujian Laboratorium Mutu Hasil Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah	Peningkatkan peran dan fungsi fasilitas Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang untuk membantu Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka pengujian mutu hasil pekerjaan konstruksi guna menjaga kualitas hasil	-	-	√

No.	Jenis Inovasi	Hasil Inovasi	Manfaat Inovasi	Tahun		
				2014	2015	2016
		Kabupaten Batang	pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa			
		Aplikasi SIMPELBANG (Sistem Informasi Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan) Kab. Batang	Memfasilitasi pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan kegiatan OPD yang ada di Kabupaten Batang	√	√	√
2.	Pengembangan SIDA	Registrasi / Verifikasi Kontrak	Teregisternya kelengkapan dokumen pengadaan barang/ jasa pemerintah atas pelaksanaan kegiatan OPD di Kabupaten Batang	√	√	√
		Surat Keterangan (SUKET)	Terkendalinya dan kesesuaian data realisasi dengan progres fisik pekerjaan terhadap pencairan anggaran pada OPD di Kabupaten Batang	√	√	√
Baperlitbang						
1	Publikasi kegiatan DRD	Web DRD	Mengetahui kegiatan dan informasi tentang DRD			√
2	Publikasi Kegiatan Riset	Web Jurnal Ristek	Menampilkan jurnal penelitian berbasis web			√
3	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	Web Bappeda	Mengetahui kegiatan dan informasi ttg Bappeda	√		
4	Bidang Perencanaan	f. E-Planing g. E-Musrenbang	Sistem perencanaan secara elektronik			√
5	Bidang Pertanian/Perkebunan	Tanaman Hias	petani/KWT			√
6	Bidang Energi	Rasionalisasi PJU	Penghematan melalui perbaikan administrasi dan migrasilangganan menjadi termeterisasi		√	
		Penggantian teknologi PJU dengan LED	Menghemat tagihandan kebutuhan energi PJU hingga 50% lebih		√	
7	Pemberdayaan Masyarakat	Desa LINIDA (Lumbung Inovasi dan Informasi Desa)	Menggali database desa dan mengembangkan potensi desa		√	√

No.	Jenis Inovasi	Hasil Inovasi	Manfaat Inovasi	Tahun		
				2014	2015	2016
RSUD Kabupaten Batang						
1	Penggunaan SIRS Sms Getway Simtem Antrian Pasien	Seperangkat Media Elektronik untuk sistem antrian	Sistem antrian rumah sakit terlaksana lancar dan teratur	√	√	√
2	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Akses Kondisi Pelayanan RSUD Kabupaten Batang Teraktual melalui Website	Memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap darurat bagi tenaga medis di unit gawat darurat rumah sakit	√	√	√
3	Review Master Plan	Master Plan	Penataan Area dan Gedung Rumah Sakit sesuai fungsi dan kebutuhan pelayanan	√	√	√

Sumber : OPD Kabupaten Batang, diolah

Seperti di jelaskan dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 sumber daya SIDA terdiri dari : kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;

- a. kekayaan intelektual dan informasi; dan
- b. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Penataan sumber daya SIDA dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA meliputi :

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi;
- f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Penduduk sebagai sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek utama dalam penguatan sumber daya SIDA. Penduduk berperan ganda sebagai subyek atau pelaku pembangunan dan juga sebagai obyek atau sasaran pembangunan.

Besarnya jumlah penduduk dapat menjadi pendorong ataupun penghambat pembangunan. Bila sebagian besar penduduk memiliki kualitas dan etos kerja yang tinggi maka dapat menjadi motor pendorong pembangunan, namun sebaliknya bila jumlah penduduk besar dan berkualitas rendah maka akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Batang dari tahun 2012-2016 terus meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2016 tercatat sejumlah 749.720 jiwa, yang terdiri dari 374.375 jiwa penduduk laki-laki dan 375.345 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 99,74%.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok umur tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Usia 0 – 14 tahun : 184.173 jiwa (24,56%)
- b. Usia 15 – 64 tahun : 515.905 jiwa (68,81%)
- c. Usia 65 ke atas : 49.642 jiwa (6,62%)

Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2016 adalah 45,32%. ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 45 orang penduduk non produktif.

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah:

Tabel 3.10.
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan
jenjang Pendidikan Tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak /belum Tamat SD	199.600	30,72%
2	SD	268.487	41,32%
3	SLTP	104.866	16,14%
4	SLTA	57.491	8,85%
5	Diploma I/II	5.336	2,98%
6	Diploma III	4.679	
7	Perguruan Tinggi/D.IV/S1/S2/S3	9.340	
Jumlah		649.799	100 %

Sumber : Kabupaten Batang dalam Data Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Batang masih berpendidikan tamat SD ke bawah, sehingga menjadi perhatian pokok dalam pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Batang untuk mendukung penguatan sumber daya SIDA.

Pemerintah Kabupaten Batang terus meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari jumlah sekolah yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Sampai dengan tahun 2016 di wilayah Kabupaten Batang terdapat :

Tabel 3.11.
Jumlah Sekolah di Kabupaten Batang

Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
TK	203	8.247	475
SD	473	72.603	5.540
SMP	57	23.150	1.037
SMK	10	3.312	267
SMU	12	4.914	475

Sumber : Web Batang dalam Data Tahun 2016

3.3. PERMASALAHAN DAN POTENSI PENGUATAN SIDA KABUPATEN BATANG

Permasalahan dan potensi Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Batang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sistem inovasi daerah
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat di kawasan perdesaan akan arti pentingnya pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- c. Minimnya aparatur yang ditugaskan dalam melakukan analisa, penelitian dan/atau pengkajian, kondisi yang ada kegiatan kajian/penelitian masih dikerjakan secara swakelola dengan tenaga ahli/nara sumber dari luar
- d. Minimnya inovasi aparatur yang ada terhadap terobosan program dan kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang ada, bahkan jarang ada

aparatur yang meluangkan waktu untuk menulis ide inovasinya untuk dapat dikembangkan

- e. Belum optimalnya Pengembangan jaringan inovasi yang telah dibentuk oleh lembaga Bappeda.
- f. Belum optimalnya kegiatan-kegiatan yang menunjang kelitbangan yang dilakukan oleh DRD sebagai salah satu kelembagaan SIDA yang dibentuk oleh Pemerintah Kab.Batang melalui Bappeda sebagai lembaga yang membawahi kelitbangan.
- g. Belum terinventarisirnya riset/ penelitian di OPD
- h. Belum terinventarisirnya riset/ penelitian yang dibutuhkan oleh OPD dan masyarakat
- i. Belum terpublikasinya hasil kelitbangan di Kab. Batang
- j. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelitbangan daerah

Sedangkan Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Batang dalam rangka penguatan SIDA diantaranya adalah :

- a. Roadmap merupakan dasar dan arah pijakan dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Inovasi Daerah. Dukungan anggaran yang pro terhadap pengembangan inovasi di daerah menjadi peluang bagi Kabupaten Batang dalam pengembangan SIDA kedepan.
- b. Muatan substansi inovasi menjadi agenda prioritas di dalam visi dan misi Kepala Daerah sehingga menjadi modal bagi pengembangan SIDA di Kabupaten Batang kedepan.
- c. Terbentuknya tim kelitbangan yang bertugas melakukan inventarisir kebutuhan penelitian OPD dan masyarakat
- d. Dalam rangka publikasi hasil kelitbangan telah dibuat website DRD dan Jurnal ristek, membuat aplikasi penelitian dan database hasil penelitian.

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BATANG

IV.1. EVALUASI KEBIJAKAN SIDA KABUPATEN BATANG

Pelaksanaan program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Batang yang dirumuskan sinergis dengan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 berdasarkan ruang lingkup kebijakan SIDA adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Evaluasi Program Kebijakan SIDA Kabupaten Batang
Capaian Kinerja Program

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	2013		2014		2015		2016		2017		Penanggung Jawab	
	Target	RP (000.000)	Target	RP (000.000)	Target	RP (000.000)	Target	RP (000.000)	Target	RP (000.000)		
Program pengembangan data/informasi												Bapelitbang
Terpeenuhnya data perencanaan 45 buku RAD pangan dan gizi	45 buku	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya data profil daerah Kabupaten Batang	Data Profil Daerah	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersusunnya dokumen foto udara ketinggian rendah	-	-	dokumen foto udara ketinggian rendah	50,00	99,89	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya 60 Buku Profil Kabupaten Batang	-	-	60 Buku	50,00	100,00	-	-	-	-	-	-	

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Terlaksananya koordinasi / konsultasi guna peny. Dokumen Profil Daerah	-	-	-	koordinasi / konsultasi peny. Dokumen Profil Daerah	30,00	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersusunnya 50 buku potensi ekonomi kabupaten batang	-	-	-	50 buku	75,00	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya buku KBDD 140 buku, KWKBDD 75 buku, ASPM 100 buku dan SIM	-	-	-	140 buku KBDD; 75 buku KWKBDD ; 100 buku ASPM	320,00	96,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan Aktif 1 paket	-	-	-	25 buku; 25 buku	100,00	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya 25 buku potensi investasi Pertanian dan 25 buku Investasi Peternakan	-	-	-	150 Buku dan CD	190,00	99,13	150 Buku dan CD; 1 paket malintan ce SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya 150 Buku dan CD Selayang Pandang Kabupaten Batang serta 1 paket maintance SIM	-	-	-	Perencanaan yang siap operasional	30,00	93,05	Dok. profil daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terdampingnya penyusunan	-	-	-													

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
dokumen profil daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya 30 buku data/informasi studi kekayaan pengembangan kawasan peternakan dan 25 buku data/informasi rencana pengembangan tanaman hias	-	-	-	-	112,50	99,45	30 buku data; 25 buku data	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya Buku Optimalisasi Sistem & Manajemen Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Buku Kajian TTG Energi, SIM Penyuluh sebanyak 120 buku	-	-	-	-	270,00	97,94	120 buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 paket maintenance SIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	50,00	99,41	-
Perencanaan yang siap operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 paket dokumen profil daerah semesteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket dokumen	50,00	100,00	-
Tersusunnya Kajian Efektivitas Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	180,22	98,50	-

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Teknologi Informasi Lingkup Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan, Penyusunan Aplikasi Sistem dan Manajemen Penyuluhan sebanyak 2 paket																

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Batang secara keseluruhan terdiri dari satu (1) program yaitu Program pengembangan data/informasi dengan rata-rata kinerja capaian anggaran program sebesar 98,84% atau berada pada kategori sangat tinggi (91%-100%). Kinerja capaian anggaran program dari tahun 2013 sampai dengan 2017 seluruhnya berada pada kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$).

IV.2. Evaluasi Penataan Unsur SIDA Kabupaten Batang

Pelaksanaan program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Batang yang dirumuskan sinergis dengan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dan berdasarkan ruang lingkup penataan unsur SIDA adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Evaluasi Program Penataan Unsur SIDA Kabupaten Batang

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab				
	2013			2014			2015			2016				2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	-	-	-	239 Desa	10,12	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Pemdes Setda
Meningkatkan pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa	-	-	-	254 Orang	690,93	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatkan pengetahuan Kepala Desa dalam pengelolaan Aparatur Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	493 Orang	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	Bag. Hukum Setda
Meningkatnya SDM Sekretaris Desa dalam administrasi desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program penataan peraturan perundang- undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program															Penanggung Jawab
	2013			2014			2015			2016			2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Tersebar luaskannya produk hukum dan informasi hukum daerah serta perpustakaan hukum melalui jaringan online/website	100	88,57	97,36	100	160,34	95,68	100	122,74	98,86	100	172,61	10,17	-	-	-	
Terlaksananya Penyebarluasan produk-produk hukum daerah	100	122,03	81,16	100	116,63	97,58	100	220,35	88,88	100	129,64	2,51	-	-	-	
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat																Setwan
Terwujudnya web DPRD dan leaflet DPRD	-	-	-	1 Tahun	12	13,33	1 Tahun	13,38	91,60	1 Tahun	26,34	24,15	-	-	-	
Program penataan daerah otonomi baru																Bag. Organisasi Setda
Terpenuhinya Evaluasi Pelayanan Publik	1 Paket	25,00	81,55	-	-	-	1 Kali	127,92	97,41	1 Kali	30,00	3,17	-	-	-	
Program penataan daerah otonomi baru																Bag. Tata Pemerintahan Setda
Terfasilitasinya kegiatan Kerja Sama Antar daerah	6 Rapat	55,42	37,57	6 Rakor	52,96	54,68	4 pks	24,54	74,46	6 pks	50,51	71,33	-	-	-	

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program															Penanggung Jawab
	2013			2014			2015			2016			2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)										
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah																BPKPAD
Tersusunnya analisa standar belanja	1 Buku analisa standar belanja 2014	116,35	94,80	1 Buku analisa standar belanja 2015	175,00	98,26	1 Buku analisa standar belanja 2016	225,53	99,83	1 Buku analisa standar belanja 2017	225,00	92,50	-	-	-	
Tersusunnya Perda dan Perbup APBD	4 Raperda dan Raperbup APBD	1.150,93	94,28	2 Raperda dan Raperbup APBD	775,54	98,61	2 Raperda dan Raperbup APBD	729,54	99,37	2 Raperda dan Raperbup APBD	651,22	61,16				
Tersusunnya sistem komputerisasi pengelolaan SIMDA keuangan	Database simda keuangan TA. 2013	292,73	82,63	Database simda keuangan TA. 2014	136,87	86,96	-	-	-	Database simda keuangan TA. 2016	277,20	27,94	-	-	-	
Penataan Administrasi Asset mll Aplikasi Simda Barang	59 SKPD	193,99	95,21	59 SKPD	219,04	93,74	59 SKPD	274,93	96,89	59 SKPD	220,00	21,14	-	-	-	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																BKD
Terkirimnya peserta Diklatplm	1 Tahun	923,27	99,04	1 Tahun	1.404,82	99,85	1 Tahun	1.647,48	89,05	1 Tahun	1.243,38	60,82	-	-	-	

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program															Penanggung Jawab
	2013			2014			2015			2016			2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Terkinimnya peserta Diklat Prajabatan	1 Tahun	19,55	97,93	-	-	-	1 Tahun	884,14	98,45	-	-	-	-	-	-	
Terkirimnya peserta Diklat Fungsional	1 Tahun	50,00	99,06	1 Tahun	100,00	98,61	1 Tahun	100,00	96,17	1 Tahun	125,00	22,47	-	-	-	
Terkirimnya peserta Diklat Teknis	1 Tahun	100,00	91,26	1 Tahun	150,00	99,15	1 Tahun	221,68	76,02	1 Tahun	361,07	22,60	-	-	-	
Program pembinaan dan pengembangan aparatur																BKD
Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawain	1 Tahun	144,05	94,60	1 Tahun	125,00	82,86	1 Tahun	165,23	99,73	1 Tahun	155,00	40,74	-	-	-	
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																Diskominfo
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1 Paket	237,38	91,12	1 Paket	165,92	97,08	1 Paket	130,00	97,76	12 bulan	110,00	46,66	-	-	-	
Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sistem informasi	1 Paket	331,10	95,22	1 Paket	400,00	94,49	1 Paket	375,00	96,43	12 bulan	600,00	10,40	-	-	-	
Terlaksananya perencanaan dan pengembangan kebijakan	1 Paket	49,00	98,61	1 Paket	64,98	98,61	1 Paket	60,00	94,95	1 tahun	60,00	31,46	-	-	-	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program															Penanggung Jawab	
	2013			2014			2015			2016			2017				
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		
komunikasi dan informasi																	Diskominfo
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi																	
SDM TIK di SKPD meningkat	1 Paket	50,00	96,47	1 Paket	60,00	99,31	1 Paket	40,00	98,20	-	-	-	-	-	-		
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi																	Disperpuska
Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan kearsipan	50 Peserta	50,00	100,00	50 SKPD	50,00	100,00	20 Orang	21,11	92,18	30 Peserta	24,71		-	-	-		
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan																	Disperpuska
Tersedianya sistem jaringan informasi kearsipan	3 unit dan 1 paket	29,90	94,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah																	Bapelitbang

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program															Penanggung Jawab
	2013			2014			2015			2016			2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan	248 Aparat Desa	234,60	98,71	168 Desa	211,34	95,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersusunnya Buku Kajian Kerjasama antar Daerah	25 Buku	80,00	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersusunnya Buku Kajian Pengembangan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	25 Buku	75	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi peran serta masyarakat dalam keglatan pembangunan melalui krenova	Fasilitasi lomba produk Krenova	40,00	97,95	fasilitas i kreativitas dan inovasi	60,00	100,00	3 Produk unggulan krenova	57,00	100,00	terselenggaranya lomba Krenova	60,00	24,06	-	-	-	
Menyusun strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan publik Kab. Batang	75 Buku	100	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Menyusun Strategi Pengembangan kelembagaan sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Batang	50 Buku	120,00	100,00	50 Buku	125,00	97,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program pengembangan																Bapelitbang

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program data/informasi/statistik daerah	Capaian Kinerja Program															Penanggung Jawab
	2013			2014			2015			2016			2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencana	285,40	98,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersusunnya Buku Kajian Ekonomi	1 Buku	75,00	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM																Disperind agkop dan UKM
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	90 UMKM	65,00	100,00	240 UMKM	110,00	97,75	-	-	-	200 UMKM	75,00	100,00	-	-	-	
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	90 PKM	75,00	99,86	420 UMKM	140,00	95,19	-	-	-	210 UMKM	138,00	100,00	-	-	-	
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	90 Koperasi	35,00	91,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bimbingan teknis akuntansi Koperasi Produktif	120 UMKM	55,00	94,89	120 UMKM	60,00	99,00	-	-	-	140 Koperasi	75,00	100,00	-	-	-	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60 Koperasi	17,50	100,00	-	-	-	120 Koperasi	60,00	100,00	15 Kec.	47,50	100,00	-	-	-	

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab				
	2013			2014			2015			2016				2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM																	Diserind agkop dan UMKM
Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga	120 Anggota	40,00	100,00	-	-	-	120 Koperasi	30,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya kualitas SDM pengelola BUMD	1 kali	55		1 kali	55		1 kali	60,5		1 kali	66,55		1 kali	73,205			Dispaperta
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan																	
Pendampingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan	32 UPG	75,00	99,12	15 Kecamatan	75,00	99,99	15 Kecamatan	45,00	99,78	15 Kecamatan	35,00	100,00	-	-	-	-	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan																	Dislutkannak
Penelitian pengembangan pemasaran hasil	-	-	-	1 Kali	61,22	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi kerjasama regional/nasional	6 Orang	20,00	100,00	1 Kali	50,00	100,00	1 Kali	35,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab				
	2013			2014			2015			2016				2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Kinerja Program al/intermediasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer																	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan																	DLH
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	-	1 Unit APPO dan Pelatihan 30 Orang	65,00	87,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan produksi hasil peternakan																	Dialutkannya
Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	4 Desa	50,00	100,00	1 paket	50,00	100,00	1 paket	40,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan																	Dialutkannya
Peningkatan kualitas kemasan hasil produksi ternak	5 Kelompok	30,00	100,00	3 Kelompok	45,50	100,00	3 Kelompok	30,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan penerapan																	Dialutkannya

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
peternakan																
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	4 Kelompok	32,50	100,00	2 Kelompok	35,75	100,00	1 Kelompok	30,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya modal dan prasarana teknologi peternakan	1 Paket	375,00	100,00	1 Paket	345,00	100,00	1 Paket	105,35	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan kesejahteraan petani																
Teraksananya peningkatan kemampuan kelompok petani	2 Kegiatan	65,00	100,00	10%	60,00	98,25	10%	90,00	100,00	10%	42,25	100,00	-	-	-	-
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan																
Pengembangan hutan tanaman	13.000 btg	50,00	96,75	1 Paket	350,00	98,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan pemasaran pariwisata																
Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	100%	140,00	99,30	100%	345,00	99,78	1 Paket	450,00	99,40	1 Paket	600,00	39,98	-	-	-	-
Program pengembangan destinasi pariwisata																

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab		
	2013			2014			2015			2016				2017	
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)
Fasilitasi pengembangan desa wisata	-	-	-	7 Desa	900,00	93,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan kerangka regulasi pengembangan destinasi wisata dan penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata	1 paket	250	65,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap															
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	9 Pekerjaan	1.459,00	56,96	3 Paket	2.315,30	96,30	5 Paket	752.23	50,61	-	-	-	-	-	-
Pendampingan Program Perikanan Tangkap	1 Kegiatan	140,00	97,16	3 Kegiatan	150,00	94,93	3 Kegiatan	86.32	99,94	-	-	-	-	-	-
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan															
Pemberdayaan Kelompok	1 Paket	100.15	98,72	1 Kegiatan	182.50	98,30	1 Kegiatan	106.00	98,25	1 Kegiatan	375.00	15,80	-	-	-

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Pembudidayaan Ikan (Poldakan)	1 Tahun	67,41	99,80	1 Kegiatan	90,00	97,69	1 Kegiatan	95,00	96,31	1 Kegiatan	90,00	74,23	-	-	-	-
Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahisar) Hasil Perikanan																
Program peningkatan kapasitas iptek system produksi																
pengembangan system inovasi teknologi industri	60 UMKM	110,00	99,49	30 UMKM	105,00	97,98	15 UMKM	209,00	100,00	30 IKM	180,00	33,33	-	-	-	-
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	30 UMKM	143,69	99,10	30 UMKM	112,00	99,38	7 KUB	100,00	100,00	40 IKM	260,00	100,00	-	-	-	-
Program pengembangan industri kecil dan menengah																
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	40 UMKM	145,00	99,29	30 UMKM	319,00	49,48	-	-	-	30 IKM	170,00	100,00	-	-	-	-
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	50 UMKM	90,00	98,10	40 UMKM	121,00	74,24	-	-	-	30 IKM	195,00	100,00	-	-	-	-

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil menengah	30 UMKM	40.00	100,00	30 UMKM	53.56	95,64	-	-	-	30 IKM	45.00	100,00	-	-	-	
Program peningkatan kemampuan teknologi Industri	-	-	-	30 UMKM	70.00	30,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing Industri manufacture	-	-	-	30 UMKM	180.00	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	240 UMKM	54.67	27,44	240 Buku	50.00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya data awal untuk data base komoditi ekspor di Kabupaten Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1 BPSK	89.75	77,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Pengembangan ekspor																
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	80	10.00	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program perencanaan tata ruang																
Perencanaan detail tata ruang dan kawasan	RDTRK 9 Kec.; Penyempurnaan RDTRK 6 Kec.; DED Gapura Batas Barat, Penyusunan; DED Eks. Pasar Bawang; DED THR Kramat	1.850,00	98,55	10 paket RDTRK	760,00	68,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program penataan administrasi kependudukan																
Pelatihan/bintek bagi operator dan verikator KTP, KK dan akte capil	-	-	-	1 Paket	25.00	98,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan hardware dan software proses	1 Paket	109.42	98,90	1 Paket	99,87	89,93	1 Paket	57,24	97,85	-	-	-	-	-	-	-

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Kinerja Program KTP, KK dan akte program SIAK , server dan jaringan komunikasi data	1 Paket	31.33	99,03	1 Paket	30.00	91,08	1 Paket	29.99	99,74	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dengan instansi terkait dalam sistem pelaporan dan pengumpulan data-data kependudukan serta verifikasi hasil pencetakan dokumen kependudukan	1 Paket	15.00	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendampingan teknis operator dan verifikasi akte, KK , dan KTP kecamatan dan kabupaten	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.95	93,62	-	-	-	-	
Pelatih.keterampil an ber usaha bg kel.miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	fasilitasi pengirim an pelatihan keteramp	-	-	-	-	-	
Program pelayanan dan rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab				
	2013			2014			2015			2016				2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Kesejahteraan sosial																	
kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pendampi ngan ASODK dan JSLU	163.49	98,91	-	-	-
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar	Meningkat -nya ketrampilan 10 anak terlantar	35		Mening kat- nya ketram pilan 20 anak terlant ar	60							Terfaksan a-nya praktek belajar kerja/ma gang 10 anak terlant ar	7		30		
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial																	
Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Kecamatan	304,37	97,84	-	-	-
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peningkat an kapasitas dan asistensi	54,86	98,36	-	-	-

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.03	99,34	-	-	-	DPMPTSP dan Naker
Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha							oleh TSKK									
Program peningkatan kesempatan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyebutan Informasi Bursa tenaga kerja, Job Market Fair	-	-	-	-	-	-	informasi Bursa tenaga kerja Jan.s/d Des 2016	160.40	99,54	-	-	-	-	-	-	
Pemberian fasilitas dan mendorong Sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	-	-	-	-	-	-	4 Paket	155.00	98,73	-	-	-	-	-	-	
Padat Karya	-	-	-	-	-	-	10 Paket	2.286.55	96,18	-	-	-	-	-	-	Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-	-	-	-	-										

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab					
	2013			2014			2015			2016				2017				
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Kegiatan	130.00	59,64	-	-	-	-
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan																		Dispermades
Terciptanya pemahaman masyarakat akan program pemberdayaan masyarakat perdesaan	209 desa	248,21	99,68	209 desa	378,67	93,03	239 Desa	117,76	97,50	239 Desa	100,00	41,19	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kinerja lembaga desa	-	-	-	-	-	-	15 desa	15,00	94,87	15 desa	18,15	94,33	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kegiatan dan prestasi desa	-	-	-	51 desa	101,27	87,19	3 desa 3 kel	70,92	99,41	3 desa	64,95	99,41	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,90	80,74	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan																		Dispermades
Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	2 desa	6,00	64,99	16 peserta	15,00	85,24	60 org	14,40	70,04	30 org	15,00	85,97	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	2 alat	59,12	96,34	160 peserta	234,40	93,52	140 org	114,00	96,70	90 org	93,87	96,61	-	-	-	-	-	-

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab		
	2013			2014			2015			2016				2017	
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)
Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	-	-	-	-	-	-	1	79,00	99,64	1	100,00	79,59	-	-	-
Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dalam posyantek	-	-	-	-	-	-	15 posyantek	146,50	95,83	15 posyantek	83,50	98,83	-	-	-
Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 desa	50,00	74,66	-	-	-
Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 desa	30,00	89,59	-	-	-
Meningkatnya kreativitas untuk kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kel	48,99	34,12	-	-	-
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teraksananya pembelajaran bagi masyarakat melalui pemanfaatan bahan pustaka	1200 pustaka	18,00	85,25	1 Kegiatan	18,00	100,00	1200 pustaka	20,00	100,00	1 Kegiatan	20,00	40,50	-	-	-
Program pendidikan luar biasa/pendidikan khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1 Kegiatan	15,00	94,00	1 Kegiatan	60,00	100,00	1 Kegiatan	60,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan																
Pendidikan Lanjutan bagi pendidik PAUD untuk memenuhi standar kompetensi	1 Kegiatan	442,88	98,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program manajemen pelayanan pendidikan																
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	1 Kegiatan	200,00	74,94	1 Kegiatan	50,00	71,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 Kegiatan	143,45	99,00	1 Kegiatan	90,00	86,58	1 Kegiatan	36,79	100,00	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan	1 Kegiatan	100,00	98,94	1 Kegiatan	100,00	76,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerapan SMM 150 900 : 2000 Dinas Pendidikan Pemuda dan	1 Kegiatan	120,00	70,64	1 Kegiatan	162,00	70,99	1 Kegiatan	73,20	100,00	-	-	-	-	-	-	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program												Penanggung Jawab				
	2013			2014			2015			2016				2017			
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	
Olahraga Kabupaten Batang Program pendidikan non formal																	Disdikbud
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal	1 Kegiatan	75.00	84,77	1 Kegiatan	111.12	76,60	1 Kegiatan	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pelabhan	-	-	-	38 Lembaga	20.00	88,90	1 Kegiatan	20.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Batang secara keseluruhan terdiri dari empat puluh tiga (43) program dengan rata-rata kinerja capaian anggaran program sebesar 85,75% atau berada pada kategori tinggi (76%-90%).

IV.3. Evaluasi Pengembangan SIDA Kabupaten Batang

Pelaksanaan program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Batang yang dirumuskan sinergis dengan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dan berdasarkan ruang lingkup pengembangan SIDA adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Evaluasi Program Pengembangan SIDA Kabupaten Batang

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	-	-	-	1 Sertifikat	103,96	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikasi ISO 9001-2008																
Program penyajian potensi sumberdaya, sarpras penanaman modal	100 buku	75,00	86,13	1 kali	75,00	96,23	100 Buku	75,00	99,55	100 Buku	78,00	99,69	-	-	-	-
Terlaksananya penyusunan/up date data potensi/ peluang investasi																
Program peningkatan ketahanan pangan	15 kec	35,00	100,00	PPH 88	35,00	97,15	PPH 90	30,00	99,34	PPH 100	20,00	81,43	-	-	-	-
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan																

Program Prioritas/ Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab			
	2013			2014			2015			2016				2017		
	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)	Target	RP (000.000)	Realisasi (%)		Target	RP (000.000)	Realisasi (%)
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	15 kec	35.00	100,00	AKE: 2.300 kkal/ka p/hari AKP: 74 gram/k ap/hari	41.00	100,00	AKE: 2.600 kkal/ka p/hari AKP: 57 gram/k ap/hari	27.00	100,00	100,00	27.00	73,20	-	-	-	-
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	4 lokasi	25.00	100,00	90%	25.00	100,00	90%	21.50	99,16	100%	17,50	65,96	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas penguatan SIDA Kabupaten Batang secara keseluruhan terdiri dari tiga (3) program yaitu Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, Program penyediaan potensi sumberdaya, sarpras penanaman modal dan Program peningkatan ketahanan pangan dengan rata-rata kinerja capaian anggaran program sebesar 93,95% atau berada pada kategori sangat tinggi (91%-100%).

BAB V

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN DALAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN BATANG

Strategi merupakan rumusan berupa pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah melalui program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran dari penguatan SIDa, dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan SIDa. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dari kurun waktu selama lima tahun.

Strategi, kebijakan dan penguatan dan pengelolaan SIDa yang mengatur kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang dituangkan dalam suatu Keputusan kepala daerah. Kepala daerah juga melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa meliputi identifikasi dan inventarisasi, analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa, serta memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDa.

Adapun strategi penguatan SIDa meliputi kebijakan penguatan SIDa, penataan unsur SIDa, dan pengembangan SIDa. Terkait dengan kebijakan penguatan SIDa, diharapkan kepala daerah menetapkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah tentang SIDa dan pembiayaannya, kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam RPJMD dan RKPD, serta penguatan kelembagaan. Penataan unsur SIDa terkait dengan lembaga/organisasi (baik pemerintah daerah, kelitbangan, institusi pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan), peraturan (yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa), dan

norma/etika/budaya (yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA).

Penataan unsur SIDA yang terkait dengan pemerintahan daerah dilakukan dengan cara membentuk BPPD, meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDA. Penataan lembaga kelitbangan dan pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Sedangkan penataan lembaga penunjang inovasi dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA.

Penataan dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan, meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan serta mensinergikan dengan penguatan SIDA. Sedangkan penataan jaringan SIDA dilakukan melalui komunikasi intensif antara lembaga SIDA, mobilisasi sumberdaya manusia, dan optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pengembangan SIDA meliputi kegiatan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA, serta pemberlanjutan penguatan SIDA.

5.1. Strategi dan Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Batang

Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Batang, yang meliputi ruang lingkup kebijakan, unsur dan pengembangan SIDA, maka strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Batang perlu dirumuskan dan diimplementasikan secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengedepankan tahapan identifikasi terhadap berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi akan berbagai permasalahan,

tantangan dan peluang penguatan SIDA Kabupaten Batang dalam lima tahun kedepan.

Strategi merupakan rumusan berupa pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah daerah melalui program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran dari penguatan SIDA, dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan SIDA. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dari kurun waktu selama lima tahun.

Adapun strategi yang ditempuh dalam Penguatan SIDA Kabupaten Batang tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA 2017-2022

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penghargaan dan hukuman bagi pelaksanaan pembangunan. b. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal pelaksanaan pembangunan. c. Membangun kesadaran anti korupsi. d. Pengembangan manajemen birokrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas aparatur birokrasi. b. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan menghindarkan birokrasi dari praktek-praktek KKN.
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun penggunaan IT. b. Kerjasama dengan sesama pemangku kepentingan. c. Komunikasi dua arah pemerintah dan masyarakat. d. Reorganisasi pemerintahan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, transparansi informasi. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan produk-produk hukum yang berorientasi pada rakyat. b. Penengakan hukum daerah secara konsisten dan adil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan kondisi masyarakat yang saling menghormati dan toleransi dalam kehidupan yang demokratis.
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan birokrasi untuk bekerja pro investasi, kreatif dan responsive terhadap kebutuhan investor. b. Menata ulang peraturan prosedur perijinan dan peraturan daerah lain yang tidak efisien. c. Meningkatkan kualitas pelayanan yang efisien dan efektif. d. Promosi produk perdagangan dan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan, kemudahan investor dan masyarakat untuk berinvestasi serta membuka lapangan kerja di Kab. Batang. b. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.

No.	Strategi	Arah Kebijakan
5.	a. Meningkatkan sarana prasarana dan efisiensi serta modernisasi tata kelola pasar. b. Meningkatkan fungsi pasar sebagai sentra kegiatan ekonomi. c. Pengembangan sentra produksi ideal d. Keserasian ketersediaan bahan baku dan produk lokal. e. Sinkronisasi kebutuhan tenaga kerja dan pendidikan. f. Membuka jaringan dan kluster pemasaran produk lokal.	a. Peningkatan daya saing pelaku perdagangan dan produktivitas lokal. b. Peningkatan jumlah dan kapasitas industri berbahan baku lokal dan padat karya. c. Peningkatan nilai tambah produk lokal.
6.	a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM. b. Membuka akses permodalan pada lembaga keuangan.	a. Meningkatnya kemandirian koperasi UKM dan IKM. b. Mengembangkan usaha perikanan yang diarahkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
7.	a. Meningkatnya ketersediaan pupuk, bibit dan obat pertanian. b. Meningkatnya sarana, program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh. c. Terciptanya industrialisasi hasil pertanian dan pemasarannya. d. Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian dan peternakan. e. Penetapan peruntukan lahan pertanian dan sawah lestari.	a. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian.
8.	a. Peningkatan kreativitas pengolahan pangan. b. Kelancaran distribusi bahan pangan. c. Pengembangan keanekaragaman pangan. d. Kebijakan pengembangan usaha Perikanan.	a. Meningkatkan produksi, produktivitas, keragaman pangan serta meningkatkan kandungan gizi makanan.
9.	a. Meningkatkan daya tarik investasi dan kemitraan kepariwisataan. b. Peningkatan intensitas parade budaya lokal. c. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, dan kelompok kesenian.	a. Meningkatkan budaya dan kesenian lokal yang budi luhur sebagai citra masyarakat Batang. b. Mengembangkan pariwisata sebagai sarana rekreasi, pendidikan dan perekonomian daerah.
10.	a. Meningkatkan pembinaan bakat untuk meningkatkan prestasi olah raga. b. Meningkatkan sarana dan prasaran olah raga yang memadai. c. Menciptakan ruang partisipasi pemuda dalam mensinergikan aktivitas stake holder dalam pengarusutamaan gender.	a. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. b. Meningkatkan daya saing masyarakat dibidang olahraga. c. Meningkatkan sinergitas aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.
11.	a. Penguatan partisipasi masyarakat dan peran institusi kebudayaan dan kemasyarakatan. b. Peningkatan prasarana pengembangan seni budaya daerah.	a. Memperkuat partisipasi masyarakat dan peran institusi kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

No.	Strategi	Arah Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan intensitas komunikasi forum antaragama/ antarbudaya. d. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan situs-situs benda cagar budaya. e. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kebudayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengembangkan wawasan kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang menghargai pluralitas. c. Meminimalisasi penyakit masyarakat dan meningkatkan derajat kehidupan warga kurang mampu.
12.	<ul style="list-style-type: none"> a. Transparansi informasi pembangunan. b. Perluasan peran dan kewenangan desa/ kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.
13.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kualitas aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola dan tata nilai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan prima bagi masyarakat Kabupaten Batang. b. Meningkatkan kualitas program Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Universal yang meliputi layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan lokal. c. Memantapkan komitmen dan sinergitas pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. d. Memantapkan komitmen dan sinergitas pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. e. Mendukung pelaksanaan pengembangan bakat dan prestasi peserta didik, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. f. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. g. Memfasilitasi pendidikan lanjutan yang variatif dan kreatif bagi lulusan sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. h. Mendorong pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan kecakapan personal di seluruh jenjang pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa. b. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan. c. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan. d. Peningkatan layanan pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus e. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. f. Peningkatan kualifikasi kesejahteraan pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan. g. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan Non Formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industry. h. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. i. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif,

No.	Strategi	Arah Kebijakan
		berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan. j. Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan.

5.2. Program dan Kegiatan Penguatan SIDA Kabupaten Batang

Ruang lingkup SIDA sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/2012 dan Nomor 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) adalah berisikan Kebijakan SIDA, Penataan Unsur SIDA dan Pengembangan SIDA. Kebijakan SIDA ini dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Batang dan tercantum di dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang serta didelegasikan kepada Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Batang. Tim koordinasi dalam tugasnya akan mengintegrasikan roadmap penguatan SIDA dengan dokumen RPJMD serta akan mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA (renaksi) dengan dokumen RKPD. Penataan unsur SIDA terdiri dari penataan kelembagaan SIDA, penataan jaringan SIDA dan penataan sumber daya. Pada pengembangan SIDA terdapat unsur pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA serta pemberlanjutan penguatan SIDA.

Adapun strategi yang ditempuh dalam Penguatan SIDA Kabupaten Batang tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Program dan Kegiatan Penguatan SIDA 2018-2022

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran (5)	2019 Target/ Anggaran (6)	2020 Target/ Anggaran (7)	2021 Target/ Anggaran (8)	2022 Target/ Anggaran (9)	OPD	
1	Membangun kesadaran anti korupsi	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Bag. PBJ
		Memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan menghindarkan birokrasi dari praktek-praktek KKN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)	12 bulan Rp. 1.300.000.000	12 bulan Rp. 2.000.000.000	12 bulan Rp. 2.200.000.000	12 bulan Rp. 2.300.000.000	12 bulan Rp. 2.500.000.000		
2	Pengembangan manajemen birokrasi	Peningkatan kapasitas aparatur birokrasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang Rp. 200.000.000	50 orang Rp. 210.000.000	50 orang Rp. 220.000.000	50 orang Rp. 230.000.000	50 orang Rp. 250.000.000		
3	Pengembangan manajemen birokrasi	Memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan menghindarkan birokrasi dari praktek-praktek KKN	Program Peningkatan Pelayanan Publik - Kegiatan Fasilitasi Rakor dan Kegiatan Pembangunan	409.000.000	425.000.000	450.000.000	475.000.000	500.000.000	Bag. Dalbang	
4	Pengembangan manajemen birokrasi	Memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan menghindarkan birokrasi dari praktek-praktek KKN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000		
5	Meningkatkan kegiatan jemput bola di desa-desa	Menambah jumlah desa yang akan dikunjungi untuk kegiatan jemput bola	Program Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	100 desa / Rp. 150.000.000	120 desa / Rp. 160.000.000	140 desa / Rp. 170.000.000	150 desa / Rp. 180.000.000	160 desa / Rp. 190.000.000	Disduk capil	
6	Peningkatan struktur jalan dan jembatan untuk akses jalur perekonomian, perdagangan dan pariwisata	Mengusulkan Anggaran melalui dana APBD, APBD Provinsi dan DAK	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Kegiatan Pembangunan Jalan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	16.280	17.908	19.699	21.669	23.835	DPU dan PR	
7	Kemudahan mengakses Sistik informasi rencana tata ruang	Pelayanan ITR agar lebih cepat	Program Perencanaan Tata Ruang - Kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah	40.589	44.648	49.113	54.024	59.426		
				1.163	1.279	1.407	1.548	1.702		

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran	2019 Target/ Anggaran	2020 Target/ Anggaran	2021 Target/ Anggaran	2022 Target/ Anggaran	OPD
8	Melakukan proses transaksi kepegawain melalui Simpeg online, supaya ada kebutuhan untuk melakukan update data.	Update data PNS melalui Simpeg online dari masing-masing OPD belum maksimal	Program Pembinaan dan Pengembangan/ Pembangunan dan Pengembangan Simpeg	187.000.000	205.700.000	226.270.000	248.897.000	273.786.700	BKD
9	Pengadaan bertahap peralatan fingerprint Tenaga outsourcing sebagai operator	Penganggaran dalam DPA	Program Peningkatan Disiplin Aparatur/Pembinaan Disiplin Pegawai	403.652.700	444.017.970	488.419.767	537.261.744	590.987.918	
10	Pertemuan rutin Komunitas intelijen daerah	Mewujudkan stabilitas kantrantibmas	Program Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Pengumpulan dan pengolahan data Situasi Daerah	7 kali 112.100.000	7 kali 121.150.000	8 kali 150.000.000	8 kali 150.000.000	8 kali 150.000.000	Kesba ngpol
11	Memberdayakan FKDM	Mewujudkan deteksi dini dan cegah dini terhadap ATGH yg berasal dari Raka Raki.	Program kegiatan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	8 kali 60.240.000	8 kali 65.000.000	8 kali 65.000.000	8 kali 65.000.000	8 kali 70.000.000	
12	Intensitas pemantauan lapangan yg terindikasi rawan konflik	Meminimalisir / penanganan konflik sosial yang humanis	Program kegiatan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Pemberdayaan Tim Terpadu Penanggulangan konflik Sosial	3 kali 42.455.000	5 kali 60.000.000	5 kali 60.000.000	4 kali 50.000.000	4 kali 50.000.000	
13	Sosialisasi kepada tomas, toga, dan budayawan pelaku budaya	Mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan kesatuan masyarakat melalui nilai luhur budaya bangsa	Program pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	2 kali 41.300.000	2 kali 50.000.000	2 kali 50.000.000	2 kali 50.000.000	2 kali 50.000.000	
14	Sosialisasi, Aparatur pemerintah, Tomas, Toga dan elemen masyarakat	Mewujudkan rasa paham dan semangat kebangsaan bagi komponen bangsa	Program pengembangan Wawasan Kebangsaan - Ceramah Ketahanan Bangsa	3 kali 76.100.000	4 kali 90.000.000	4 kali 90.000.000	3 kali 78.000.000	3 kali 78.000.000	Kesba ngpol
15	Terlaksananya	Terwujudnya Wawasan	Program pengembangan	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran	2019 Target/ Anggaran	2020 Target/ Anggaran	2021 Target/ Anggaran	2022 Target/ Anggaran	OPD
21		Rehabilitasi dan Rekonstruksi	dan Pananganan Pengungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Diper masde s
			Fasilitasi Pelatihan Damage and Losses Assesment (DALa)	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	
			Fasilitasi Pelatihan Psikososial Pasca Bencana	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	
			Fasilitasi Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasma)	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	
			Optimalisasi Sistem Pelaporan Kejadian Bencana Online	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	20%/ 50.000.000	
			Fasilitasi Pelatihan Perlindungan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) Pasca Bencana	25%/ 50.000.000	25%/ 50.000.000	25%/ 50.000.000	25%/ 50.000.000	25%/ 50.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	
			- Pendidikan dan Pelatihan Formal						
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	33.100.000	35.000.000	37.000.000	40.000.000	45.000.000	
			- Pelatihan Ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentang BUMDes						
- Pelatihan ketrampilan usaha Industri kerajinan	90.500.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	120.000.000				
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	259.500.000	300.000.000	330.000.000	350.000.000	400.000.000				
- Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif									

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran	2019 Target/ Anggaran	2020 Target/ Anggaran	2021 Target/ Anggaran	2022 Target/ Anggaran	OPD
22			<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kader Posyandu - Pelatihan masak PMT-AS 	<p>23.800.000</p> <p>19.500.000</p>	<p>30.000.000</p> <p>25.000.000</p>	<p>35.000.000</p> <p>30.000.000</p>	<p>40.000.000</p> <p>35.000.000</p>	<p>45.000.000</p> <p>40.000.000</p>	Dinas Sosial
			<p>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Manajemen dan administrasi bagi aparatur pemerintah Desa - Pembinaan manajemen dan administrasi bagi anggota BPD - Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan - Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan 	<p>200.000.000</p>	<p>250.000.000</p>	<p>250.000.000</p>	<p>300.000.000</p>	<p>300.000.000</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan manajemen dan administrasi bagi anggota BPD - Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan 	<p>85.350.000</p> <p>44.600.000</p>	<p>100.000.000</p> <p>62.500.000</p>	<p>110.000.000</p> <p>65.000.000</p>	<p>115.000.000</p> <p>70.000.000</p>	<p>120.000.000</p> <p>75.000.000</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan 	<p>46.000.000</p>	<p>50.000.000</p>	<p>55.000.000</p>	<p>60.000.000</p>	<p>65.000.000</p>	
			<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin. - Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 	<p>250.000.000</p> <p>300.000.000</p>					
			<p>Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Pelayanan Psikososial bagi PMKS korban bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center. - Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi 	<p>100.000.000</p> <p>200.000.000</p>					

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran	2019 Target/ Anggaran	2020 Target/ Anggaran	2021 Target/ Anggaran	2022 Target/ Anggaran	OPD
23	Meningkatkan kreativitas dan inovasi masy di Kab. Batang	Menyelenggarakan lomba krenova tk. Kab. , partisipasi dalam Lomba Krenova Prov dan Pameran Prduduk Inovasi	sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan sosial masyarakat (PKH). - Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat. - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program Peningkatan Pelayanan Penyandang masalah sosial - Pemantauan dan evaluasi - Bantuan sosial penyandang masalah sosial	605.000.000	605.000.000	605.000.000	605.000.000	605.000.000	
				200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
				275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	
				1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
				250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
				200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	
				66.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Bapelit- bang
				300.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022**

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran	2019 Target/ Anggaran	2020 Target/ Anggaran	2021 Target/ Anggaran	2022 Target/ Anggaran	OPD
	Meningkatkan kualitas hasil kelibangan	Melaksanakan riset berbasis kebutuhan OPD dan masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah/ Sosialisasi Kebijakan Perenc. Pemb. Daerah	193.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
		Melaksanakan kajian SIDA	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah / Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pemb. Daerah	93.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
		Menyelenggarakan BinteK Perenc., binteK kelibangan	Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah / Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pemb. Daerah		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		Meningkatkan koordinasi kelibangan	Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah / Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pemb. Daerah	65.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	
	Meningkatkan publikasi kelibangan daerah	Membuat web hasil penelitian daerah	Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pemb. Daerah / Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pemb. Daerah	20.000.000	20.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	
24	Menggunakan tenaga kompeten dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait	Memperkuat website JDJH dan perpustakaan hukum yang berisi produk hukum, literature hukum dan informasi hukum yang lengkap dan selalu up date	Penataan Peraturan Perundang-undangan/Publikasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Bag. Hukum
25	Menambah SDM untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rekrutmen dan Mencari Mitra Dokter dan Tenaga Medis serta menganggarkan dalam dokumen anggaran	Kemitraan Peningkatan Kuantitas Dokter dan Paramedis	737.000.000	810.700.000	891.770.000	980.947.000	1.079.041.700	
	Membuat peraturan yang terkait dengan peningkatan type rumah sakit.	Mengajukan draf aturan dan rancangan peraturan ke pemerintah daerah agar dapat di buatkan perda.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	48.180.000	52.998.000	58.297.800	64.127.580	70.540.338	
	Melakukan Lobby dan Koordinasi	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara terus menerus	Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Di dalam dan Ke Luar	519.200.000	571.120.000	628.232.000	691.055.200	760.160.720	

No.	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan	2018 Target/ Anggaran	2019 Target/ Anggaran	2020 Target/ Anggaran	2021 Target/ Anggaran	2022 Target/ Anggaran	OPD
	dengan pengampu urusan dan pengambil kebijakan.	dengan melengkapi data pendukung	Daerah						

BAB VI PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Penyusunan dokumen Kabupaten Batang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan nilai praktis atau menerapkan cara baru dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam proses pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka penguatan SIDa, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menyusun dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dengan tujuan memberikan gambaran dan kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang, Mengevaluasi capaian pelaksanaan penguatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, dan Menyusun strategi, kebijakan dan program kegiatan dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Kondisi Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Batang saat ini masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, diantaranya belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sistem inovasi daerah; kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan kajian/penelitian; dan minimnya aparatur untuk dapat melakukan terobosan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di samping itu, Kabupaten Batang masih memiliki beberapa potensi dalam rangka penguatan SIDa dengan berdasarkan pada Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menjadi peluang dalam mendukung pengembangan inovasi di Kabupaten Batang, serta dengan muatan substansi inovasi yang menjadi agenda prioritas di dalam visi dan misi Kepala

Daerah, akan menjadi modal bagi pengembangan SIDA di Kabupaten Batang kedepan.

VI.2. REKOMENDASI

Di dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Batang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Dokumen Roadmap SIDA sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) dengan ruang lingkup penguatan SIDA meliputi Kebijakan SIDA, Penataan Unsur SIDA dan Pengembangan SIDA.
2. Membentuk Tim koordinasi yang memiliki tugas untuk mengintegrasikan *roadmap* penguatan SIDA ke dalam dokumen RPJMD serta mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA ke dalam dengan dokumen RKPD.
3. Menyusun Kebijakan, program dan kegiatan penguatan SIDA tahun 2017-2022 oleh Bupati dan tercantum di dalam *roadmap* penguatan SIDA serta didelegasikan kepada Tim Koordinasi SIDA Daerah.
4. Melakukan penataan unsur SIDA terdiri dari penataan kelembagaan SIDA, penataan jaringan SIDA dan penataan sumber daya. Pada pengembangan SIDA terdapat unsur pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA serta pemberlanjutan penguatan SIDA.